



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



INVESTASI RP 30 TRILIUN PABRIK SMELTER NIKEL

BACA HALAMAN 2-4



**SAH, MAKMUR
MARBUN DILANTI, K
SIAP JALANKAN TUGAS
SEBAGAI PJ BUPATI PPU
BACA HALAMAN 34**



Investasi Rp 30 Triliun Pabrik Smelter Nikel

Untuk Penuhi Kebutuhan Energi Kaltim

SANGASANGA-Pabrik megah dengan nuansa biru yang bertuliskan huruf aksara Han atau Aksara Tionghoa terpampang di sebuah pabrik smelter nikel yang terletak di Kelurahan PENDINGIN, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara.

Sekilas, suasana yang diciptakan terasa seperti berada di negeri China. Terlihat beberapa pekerja juga berasal dari negeri tirai bambu tersebut.

Hal ini terungkap ketika Gubernur Kaltim, Isran Noor, bersama Bupati

Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, meresmikan tahap pertama pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri (KFI) pada Selasa (19/9/2023).

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat akan memberikan dukungan kepada semua bidang investasi, termasuk investasi di bidang smelter nikel ini.

"Hari ini adalah hari istimewa, peresmian tahap pertama pabrik smelter nikel. Kami hadir untuk memberikan

dukungan kepada PT KFI agar rencana pabrik ini dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ujar Edi Damansyah. "Ikut terkejut dengan kecepatan PT KFI dalam merealisasikan proyek ini, hanya dalam waktu 19 bulan," tambahnya.

Bagi Edi Damansyah, investasi senilai Rp30 Triliun ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian di daerah tersebut, terutama warga Kecamatan Sangasanga.



Menurutnya, Kabupaten Kukar memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat mendukung industri hilir.

Oleh karena itu, Kukar harus terbuka terhadap berbagai rencana investasi yang akan masuk. Kehadiran pabrik smelter nikel di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan transisi energi di Kaltim dan Indonesia.

Edi Damansyah mengingatkan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kehadiran PT KFI dengan aktif terlibat dalam proyek ini. "Penting untuk menjaga kondusifitas investasi di Kukar. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi manajemen perusahaan juga memiliki peran yang sangat penting," kata Edi.

"Kepatuhan terhadap semua aturan pedoman, terutama izin pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal akan diawasi dengan ketat," lanjutnya.

Untuk hal-hal yang memerlukan komunikasi, disarankan untuk disampaikan dengan cara yang baik, melalui saluran dan mediasi yang tepat, sehingga dapat didiskusikan bersama perusahaan.

Keberadaan industri ini menjadi salah satu sektor yang diinginkan oleh Kutai Kartanegara, dan pabrik smelter nikel pertama di Kaltim ini

diharapkan dapat menyerap 10 ribu tenaga kerja lokal.

"Kepada warga masyarakat, mari kita semua bekerja sama dalam mengawal proses ini. Investasi PT KFI tidak hanya akan memberikan kontribusi pada negara, tetapi juga akan mendorong ekonomi lokal di Sangasanga dan sekitarnya," kata Edi Damansyah.

Sebagai informasi tambahan, PT Kalimantan Ferro Industri dibentuk untuk melaksanakan instruksi Presiden terkait dengan hilirisasi sumber daya alam, terutama logam nikel. Pe-

rusahaan ini didirikan pada tanggal 26 November 2021, setelah UU No 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

KFI menandatangani Perjanjian Jual-Beli Tenaga Listrik (PJBT) dengan PLN Persero sebesar 800MW pada tanggal 31 Desember 2021, yang menjadi tonggak utama dalam pembangunan proyek ini. Dengan menggunakan listrik dari PLN, KFI tidak perlu membangun pembangkit tenaga listrik sendiri, sehingga lingkungan sekitar KFI dapat tetap terjaga.





Sejak awal peletakan batu pertama pada 25 Januari 2022, KFI telah menginvestasikan dana sebesar Rp 5 Triliun hingga saat ini. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada kuartal kedua tahun 2023 mencatat investasi sebesar Rp 2,7 triliun.

Terkait dengan penggunaan tenaga kerja lokal, setidaknya 1700 tenaga kerja lokal telah bekerja di KFI, dan rekrutmen masih berlangsung aktif di 6 Kelurahan dan 2 Kecamatan di sekitar Palaran dan Samarinda Kota.

Jumlah tenaga kerja asing kurang dari 250, terutama terkait dengan pembangunan pabrik dan tingkat manajerial setelah pabrik beroperasi.

“Bersama-sama, kami telah sepakat bahwa kebutuhan tenaga kerja di smelter nikel ini akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini akan membantu kami dalam menyiapkan sumber daya manusia yang dapat terserap untuk bekerja di sini,” tegas Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Saat ini, PT KFI telah memegang Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. PT KFI mulai melakukan penyambungan listrik GI PLN pada tanggal 30 Agustus 2023, yang juga menandai tahap pertama komisi.

PT KFI juga memperkenalkan teknologi RKEF baru yang lebih ramah lingkungan. Meskipun baru dua dari 18 line yang akan didirikan dapat beroperasi saat ini. (MK)

LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

AUTO2000 BONTANG
Jl. Binger Kencana No. 226A, Sebelah Dc, Bontang Barat
Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive
Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD
APLIKASI M-TOYOTA

URUSAN TOYOTA LEBIH MUDAH!

member of ASTRA



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



GAET INVESTOR: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A. Paliwang SH, M.Hum mendampingi kunjungan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Gubernur Gandeng Asprindo Tarik Investor ke Kaltara

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah bermitra dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dalam rapat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Asprindo dan Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara daring di rumah jabatan (rujab) Gubernur Kaltara, Ahad (17/9).

“Mudah-mudahan para anggota Asprindo yang memiliki jaringan dan dukungan yang kuat dapat membuka peluang baru bagi pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan industri lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.

Dihadapan jajaran DPW Asprindo

Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang meminta dukungan dalam menarik investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

“Mudah-mudahan dengan masuknya beberapa industri yang akan dibawa oleh Asprindo, kita dapat membentuk suatu kampung industri,” ungkapnya.

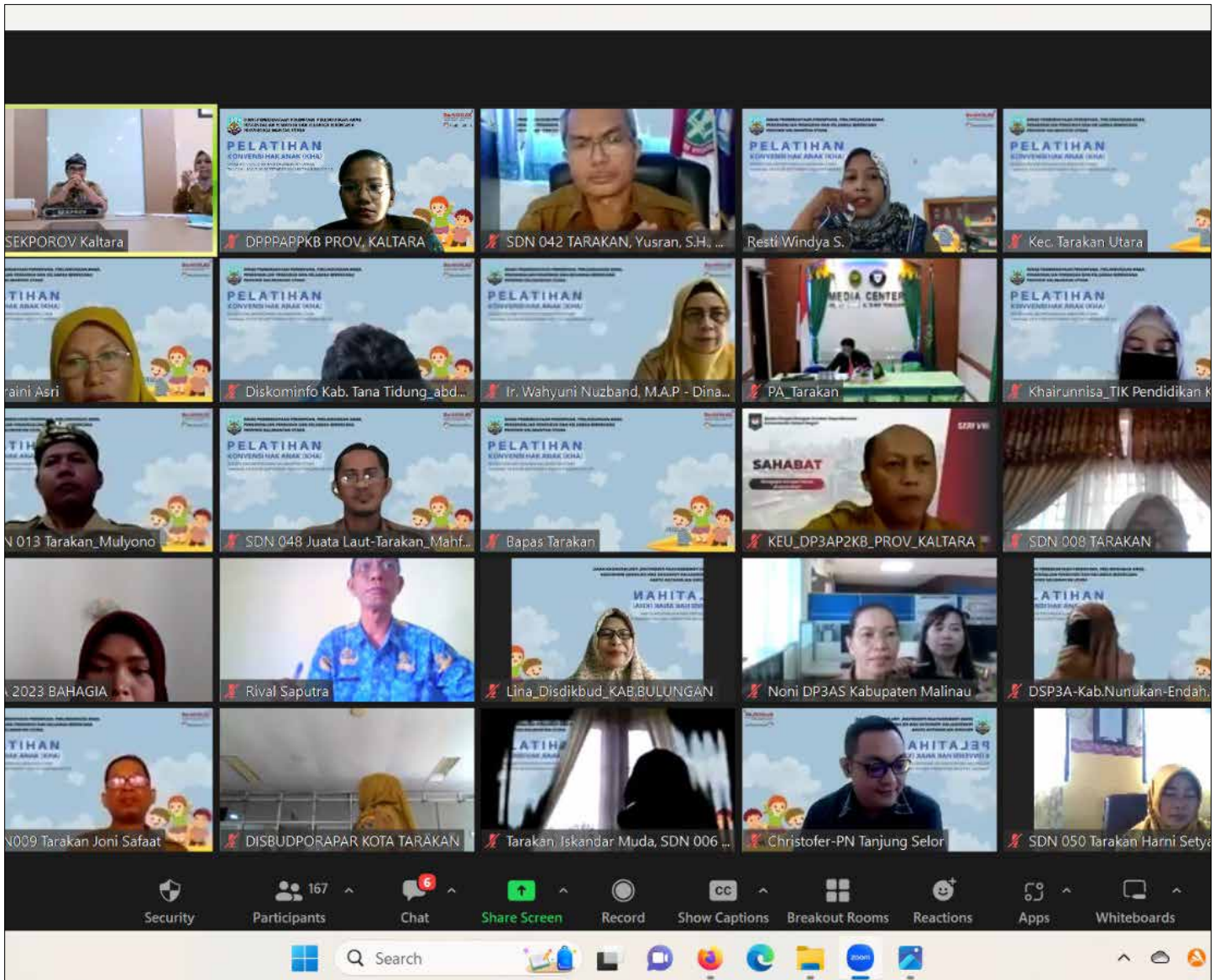
Banyak potensi dan peluang yang ada untuk pembangunan di Provinsi Kaltara, termasuk dalam bidang pertanian. Saat ini, kata Gubernur Zainal, petani-petani milenial sudah mulai aktif dan berperan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kaltara, dengan kelompok petani milenial yang telah terbentuk di 4 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

“Hal ini juga telah disampaikan bahwa petani-petani di Kaltara telah aktif berperan, dan kami sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN), bukan hanya untuk provinsi tetangga, melainkan Kaltara menjadi gerbang IKN,” ujarnya.

“Dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), selalu memberikan dukungan dan mengembangkan usaha di sektor pertanian dan peternakan dengan menyediakan bantuan berupa bibit pohon serta hewan ternak yang dibeli dan dikembangbiakan untuk digunakan di Kaltara,” sambungnya.

Gubernur juga langsung menyampaikan kepada Ketua DPP Asprindo, Jose Rizal, agar dapat membantu DPW Asprindo Kaltara dalam memberikan dukungan melalui peluang investasi bagi pengusaha besar untuk berinvestasi di Kaltara.

“Dan saya, melalui kesempatan ini, ingin menyatakan bahwa jika ada investor di Kaltara, termasuk semua proses aplikasi dan sebagainya, saya akan membantu mempercepatnya dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di Kaltara,” katanya. **(dkisp)**



Bangun SDM Terlatih untuk Wujudkan Provinsi Layak Anak

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, M.AP menghadiri secara virtual kegiatan Pelatihan Hak Anak Tahun 2023 pada, Selasa (19/9/2023).

Sekprov mengungkapkan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Ia mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjadikan Kaltara tempat yang layak bagi anak-anak.

“Semoga melalui pelatihan ini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih akan muncul, mampu memahami konvensi Hak Anak secara konseptual, dan menerapkannya di Kaltara,” jelas Sekprov.

Sekprov Suriansyah juga mengingatkan pentingnya Undang-Undang

(UU) Perlindungan Anak berdasarkan prinsip-prinsip Hak Anak, yang merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis dari berbagai negara. Indonesia, termasuk Kaltara, telah meratifikasi konvensi Hak Anak sejak tahun 1990.

Lebih lanjut, Sekprov mengungkapkan hasil dari evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023.

Dikatakan bahwa dari lima Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi mandiri, tiga di antaranya, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Malinau, berhasil lolos untuk mengikuti verifikasi administrasi.

“Ada dua kabupaten/kota berhasil meraih KLA kategori Pratama. Hal ini menjadi langkah penting dalam

upaya bersama menciptakan Kaltara yang layak bagi anak-anak,” kata Sekprov Suriansyah.

Selain itu, berdasarkan evaluasi data KLA Tahun 2023, Pemerintah Kalimantan Utara memutuskan untuk melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) secara online.

“Tujuannya adalah menciptakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan memahami Konvensi Hak Anak secara menyeluruh, serta mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kaltara. Dengan semangat ini, Kaltara bergerak maju menuju status yang lebih baik sebagai tempat yang ramah anak,” tuntasnya. (dkisp)



Kaltara Bertengger di 5 Besar Penggunaan Produk Dalam Negeri

TANJUNG SELOR - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam 5 besar provinsi dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi dalam persentase terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan persentase 50,96, berada di atas Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mencapai 53,20 persen.

Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen.

Sedangkan provinsi dengan Penggunaan PDN tertinggi secara nilai rupiah adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar).

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui zoom meeting di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur, pada Senin (18/9).

“Berdasarkan data dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI hingga 15 September 2023, Kaltara provinsi urutan ke-2 penggunaan PDN Tertinggi terhadap RUP, atau berada di atas Kalteng yang mencapai 53,20 persen. Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen,” jelas Sekprov Kaltara, Suriansyah.

Hadir mendampingi Sekprov Suriansyah di antaranya Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah, Amir Hamsyah, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Hj. Hasriyani, S.H., M.M.

Rakor dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Kementerian Koor-

dinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala LKPP RI, Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., serta Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

Diketahui bahwa ada lima tujuan dari P3DN, yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan utilisasi nasional untuk meningkatkan efisiensi industri agar dapat bersaing di pasar global, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan mengoptimalkan belanja pemerintah, dan penghemat devisa negara.

Adapun target capaian yang telah tercapai meliputi, capaian 95 persen target serapan APBD/APBN, transaksi minimal sebesar 500 triliun di e-katalog, peningkatan permintaan domestik terhadap produk dalam negeri, dan peningkatan jumlah onboarding UMKM/Industri Kecil Menengah ke ekosistem digital. **(dkisp)**



PEMBUKAAN : Gubernur – Wakil Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si memimpin pelaksanaan Rakorwil FKUB se-Kalimantan, Senin (18/9).

Kaltara Tuan Rumah Rakorwil FKUB se-Kalimantan 2023

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP., M.Si, memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023.

Diketahui bahwa Provinsi Kaltara menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakorwil FKUB se-Kalimantan tahun 2023. Pembukaan Rakorwil dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (18/9).

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik pelaksanaan Rakorwil dan berharap acara ini akan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar FKUB se-Kalimantan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ia juga mengungkapkan bahwa Kaltara telah menjadi teladan di Kalimantan dalam strategi dan upaya yang dilakukan oleh FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama.

"Kaltara sudah membuktikan itu dengan selalu masuk 10 besar da-

lam penilaian indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) sejak tahun 2013 sampai sekarang. Pada tahun 2019, kita bahkan peringkat pertama. Sekarang di tahun 2022, kita berada pada peringkat 3 setelah Riau dan NTT, dan Kaltara tidak pernah keluar dari 10 besar nasional," kata Gubernur Zainal.

Selama Rakorwil ini, peserta akan membahas berbagai isu terkait kerukunan umat beragama. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan FKUB, strategi dan upaya menjaga toleransi serta kerukunan umat beragama, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Gubernur juga menekankan bahwa Rakorwil ini diharapkan dapat menjadi persiapan yang baik untuk menyambut pemilihan umum (pemilu) dengan damai. Beliau menegaskan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan toleransi selama proses pemilu.

Selain itu, Gubernur Zainal Paliwang mengumumkan bahwa Kaltara telah membentuk Komite Indonesia Bersatu (KIB), sebuah inisiatif yang menghimpun berbagai etnis dan agama.

Menurut Gubernur, Kaltara merupakan gambaran mini dari Indonesia, dengan semua suku, agama, dan etnis yang ada di Kaltara. "KIB bertujuan untuk mempromosikan persatuan, kerukunan, dan keberagaman sebagai kekuatan Indonesia yang sejati," ungkap Gubernur Zainal.

Gubernur berharap bahwa melalui Rakorwil FKUB Zona Kalimantan dan keberadaan KIB, Kaltara akan terus menjadi contoh positif dalam memelihara harmoni antar-etnis dan agama, dan juga akan berkontribusi positif dalam memperkuat persatuan di seluruh Indonesia.

"Kita berharap Rakorwil ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman bagi FKUB se-Kalimantan dalam menjaga kerukunan umat beragama," tutup Gubernur Zainal Paliwang

Rakorwil FKUB se-Kalimantan tahun 2023 dihadiri oleh sekitar 180 peserta dari FKUB provinsi, kabupaten/kota di seluruh Kalimantan. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 18 hingga 20 September 2023. **(dkisp)**



BPSDM Kaltim Gelar Sharing Session untuk Jawab Tantangan Pembangunan IKN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-42 dengan tema "Pembangunan IKN - Menimbang Peluang dan Tantangan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)" untuk ASN di lingkungan Provinsi Kaltim dan luar Kaltim, Selasa (19/9) pukul 10.00 WITA - 12.00 WITA.

Kegiatan Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan acara ini juga disiarkan langsung dari kanal YouTube BPSDM Kaltim agar bisa disaksikan masyarakat umum.

Pada Sharing Session kali ini, menampilkan seorang narasumber dari peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), yakni Rusli Cahyadi, Ph.D.

Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP, saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara, mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan Sharing Session dari tahun 2022 hingga September 2023, ini sudah yang ke-42.

"Alhamdulillah, kita konsisten meningkatkan pengetahuan ASN, salah satunya lewat Sharing Session ini, kita sudah mulai dari 2022 hingga 2023 ini," ujarnya.

Nina Dewi mengatakan strategi penataan ruang dalam Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk mewujudkan sebagai kota yang aman, modern, produktif, dan sebagai simbol identitas bangsa Indonesia yang memiliki visi sebagai kota dunia dan bangun dengan konsep smart green beautiful, maka diperlukan sumber daya manusia ASN yang smart dan paham teknologi.

"Untuk mewujudkan IKN sebagai kota aman, modern, produktif, dan sebagai identitas, maka diperlukan sumber daya manusia ASN yang smart dan melek teknologi. ASN mampu beradaptasi dengan implikasi bisnis melalui penerapan ekosistem pemerintahan," katanya.

Nina Dewi juga berharap para peserta bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya, dan semoga para peserta mampu terus produktif bersama BPSDM membangun SDM khususnya di Kaltim.

"Ikuti acara ini dan serap ilmu sebaik-baiknya serta mampu mendukung kami dengan terus produktif dan turut membantu memajukan Kaltim CorpU yang sudah kita luncurkan," harapnya.

Dalam acara Sharing Session kali ini dimoderatori oleh Widyaswara

BPSDM Kaltim, Yoyok Setyo Langgeng, M.Si. Acara ini sejak dibuka diikuti oleh 245 peserta dan hingga berita ini diterbitkan sudah diputar sebanyak 444 kali. Setiap peserta yang mengikuti melalui aplikasi Zoom akan diberikan sertifikat pelatihan secara gratis. (adv)

Pewartu: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Tampilan Kanal YouTube BPSDM Kaltim (dari kiri), Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, M.AP, peneliti Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Rusli Cahyadi, Ph.D., dan Widyaswara BPSDM Kaltim, Yoyok Setyo Langgeng, M.Si.



Layanan Lanjut Usia Butuh Ruang Khusus di Puskesmas

SAMARINDA – Hal menarik terkait bagaimana pelayanan kesehatan pada usia lanjut disampaikan oleh Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati pada Pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Angkatan II dan III Tahun 2023 di meeting room Horison Hotel lantai III, Senin (18/9/2023).

Tak bisa dimungkiri, para lanjut usia masih banyak terikat pada kegiatan-kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan kemampuan, minat dan kondisi kesehatannya.

Untuk mengimbangnya, pelayanan lanjut usia di Puskesmas diupayakan secara lintas disiplin dan lintas sektor. Artinya, pelayanan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan gender dan kesamaan hak.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas bahwa sasaran pada kebijakan tersebut adalah pra lanjut usia (45-59 tahun), lanjut usia (60

tahun), lanjut usia risiko tinggi (lanjut usia 70 tahun atau Lanjut Usia dengan masalah kesehatan), keluarga, masyarakat tempat Lanjut Usia berada serta sasaran tidak langsung yaitu masyarakat luas, organisasi sosial, petugas kesehatan, maupun Ibu Hamil, Bayi dan Balita, Usia Sekolah, Remaja dan Usia Subur.

“Untuk itu, pelayanan kepada lanjut usia yang datang ke Puskesmas, sebaiknya diberikan ruangan khusus supaya tidak harus mengantre bersama dengan pasien umum lainnya,” katanya.

Tapi, apabila kondisi Puskesmas tidak memungkinkan, dapat dilakukan diruangan pemeriksaan umum den-

gan syarat pasien lanjut usia harus didahulukan.

“Prinsip layanan pasien lanjut usia di Puskesmas adalah berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri,” sebutnya.

Lanjut usia yang sehat adalah lanjut usia berdasarkan hasil pengkajian paripurna geriatri masuk dalam kategori kelompok 1 dan 2 yaitu lanjut usia yang bebas dari ketergantungan kepada orang lain atau tergantung

pada orang lain tapi sangat sedikit, atau mempunyai penyakit yang terkontrol dengan kondisi medik yang baik.

“Ingat, tidak semua pasien geriatri harus dirujuk ke RS, ada kasus-kasus pasien geriatri sebenarnya masih bisa ditangani di Puskesmas,” pesannya. **(rs1/adv/dinkes)**

Pewarta : Adhi Abdian

Editor : Nicha Ratnasari



Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati.



Suasana pelatihan dengan tema kejiwaan pasien usia lanjut.

Kondisi Nakes dan Dokter Pengaruhi Kenyamanan Pasien Lansia

SAMARINDA-Kondisi kejiwaan pasien lanjut usia (lansia) wajib menjadi perhatian khusus. Salah satunya, depresi dan demensia adalah hal yang paling sering ditemui.

Item itu menjadi salah satu topik bahasan dalam Pelatihan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kaltim 2023 Angkatan II dan III.

“Pelayanan kesehatan jiwa dan intelegensia pada usia lanjut lebih kepada pelayanan dengan pendekatan yang lebih intensif dengan pertanyaan dengan konsep diskusi yang lebih menenangkan pasien,” dr. Eka Yuni Nugrahyu, Sp.KJ dari Rumah

Sakit Atma Husada.

Diuraikan, pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kondisi kehidupannya, kondisi semangat, tingkat kebahagiaan, permasalahan dan bagaimana kemampuan pasien saat ini, dilakukan dengan teknis yang tepat agar bisa menumbuhkan rasa nyaman pasien.

Menurutnya, kondisi depresi adalah hal paling sering ditemui. Untuk pasien depresi, cara dokter atau nakes berkomunikasi harus bisa memancing, pasien untuk lebih semangat.

“Bagaimana pembawaan dokter dan nakes sangat memengaruhi

kondisi pasien saat ditanya terkait kondisinya,” katanya.

Apalagi kondisi pasien depresi sangat rentan dan sangat sensitif. Proses mengorek informasi juga harus lebih detailing. Untuk bisa mendapatkan kondisi ideal dalam proses itu, ada sesi latihan bagi seluruh peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok.

“Tujuannya untuk mendapatkan kondisi ideal saat proses memahami kondisi pasien,” Ucapnya lagi. **(Rs1/adv/dinkes)**

Pewarta : Adhi Abdian

Editor : Nicha Ratnasari





ADHI/MEDIAKALTIM

Foto bersama peserta pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri Tenaga Kesehatan Tingkat Kaltim.

Pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri Nakes Tingkat Kaltim, Upaya Mencapai Lanjut Usia Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif

SAMARINDA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim menggelar Pelatihan Pelayanan Kesehatan Geriatri bagi Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Angkatan II dan III Tahun 2023 di meeting room Horison Hotel lantai III pada Selasa (19/9/2023).

Pelatihan yang menghadirkan perwakilan Puskesmas se-Kaltim ini, diisi oleh pemateri dari tim fasilitator Pelayanan Kesehatan Geriatri seperti, dr. Santy Sijabat, Sp.PD, dr. Muhibuddin Perwira Negara dan dr. Sp.KJ (RS AHM). Kemudian ada dari PDGKI Cabang Kaltim, PDGI Wilayah Kaltim dan perwakilan PPNi Provinsi Kaltim.

Hadir juga dalam sesi pembukaan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Kaltim, dan Master of Training (MoT) dari UPTD Bapelkes Provinsi Kaltim.

Pelatihan ini merupakan bentuk komitmen Dinkes Kaltim dalam upaya untuk meningkatkan derajat kes-

ehatan Lanjut Usia untuk mencapai Lanjut Usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

“Lanjut Usia adalah masalah kesehatan sehingga diperlukan pembinaan kesehatan pada kelompok Pra Lanjut Usia dan Lanjut Usia,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ., M. Kes., MARS melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kaltim, Fitnawati.

“Melalui kegiatan pelatihan ini baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang merupakan unit terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat maupun

perorangan diharapkan mampu melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tingkat dasar bagi lanjut usia, paparnya.

Lebih detail, ia mengurai tujuan pelaksanaan pelatihan agar meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan santun lanjut

usia, meningkatnya koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, lanjut dia, meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia, dan meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat.

“Prinsip pelayanan kesehatan Lanjut Usia yaitu menjadi Lanjut Usia sehat adalah hak asasi setiap manusia. Artinya, pelayanan kesehatan primer adalah ujung tombak untuk tercapainya Lanjut Usia sehat yang didukung oleh pelayanan rujukan yang berkualitas atas partisipasi Lanjut Usia,” pungkasnya. **(rs/adv/dinkes)**

Pewarta : Adhi Abdian
Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mendukung percepatan TP2DD Bontang.

Wawali Bontang Dukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Najirah mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilakukan Bapenda Kota Bontang dengan menghadiri High Level Meeting pada Selasa (19/9/2023) di Ballroom Hotel Bintang Sintuk.

Najirah mengatakan pemerintah Kota Bontang terus mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya terkait dengan pendapatan asli daerah dengan cara non tunai.

Najirah menambahkan bahwa tujuan TP2DD untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

"Tim TP2DD merupakan produk

koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait yang terbentuk dan mendorong inovasi," kata Najirah, Selasa (19/9/2023).

Selanjutnya, Najirah mengatakan TP2DD menciptakan dan perluasan elektronifikasi transaksi berubah. Akselerasi dan inovasi TP2DD dalam aplikasi Qris merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan satuan tugas TP2DD.

"Percepatan digitalisasi daerah berguna untuk peningkatan efisiensi dan pelayanan publik serta berguna untuk transparansi keuangan daerah terutama di Kota Bontang. Selain itu, memberikan kemudahan kepada wa-

jib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran dengan memperbanyak kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non tunai. Memberikan inovasi dalam wajib pajak dalam kesiapan dalam pembayaran pajak daerah dengan transaksi non tunai," kata Najirah.

Najirah menambahkan pembayaran pajak daerah ke depannya diharapkan dapat dibayarkan di semua bank yang bukan hanya di bank konvensional. "Diharapkan ke depan pembayaran pajak bisa dibayarkan di semua bank," pungkasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPK Kaltim, Taufik S.Sos, M.Si.

DPK Kaltim Serahkan Penghargaan Lomba Pustakawan dan Literasi Tingkat Kaltim

SAMARINDA-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur (Kaltim) telah melaksanakan penganugerahan 7 kategori Pemenang Lomba Kepustakawanan dan Peningkatan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi Kaltim pada hari Selasa, 19 September 2023, pukul 08.00-12.00 WITA di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelumnya, DPK Kaltim telah melaksanakan beberapa kategori Lomba, yakni 4 lomba Kepustakawanan dan 3 Lomba Literasi Masyarakat, dan semuanya telah ditentukan pemenangnya. Semua pemenang adalah perwakilan dari setiap kabupaten/kota.

"Setelah tahapan panjang Kita efektifnya mulai Juni 2023 sampai pada lomba berakhir pada 11 September 2023, dan akhirnya hari ini tanggal 19 September 2023, itu pen-

ganugerahan penghargaan kepada pemenang lomba Kepustakawanan dan Literasi tingkat Kaltim, Ini adalah peserta terbaik dari semua kabupaten/kota," ungkap Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPK Kaltim, Taufik S.Sos, M.Si., saat ditemui oleh awak mediakaltim.com usai acara.

Tujuh lomba yang telah dilaksanakan oleh DPK Kaltim tersebut adalah Lomba Pustakawanan Perpustakaan tingkat SD, Perpustakaan tingkat SMP/MTS, Perpustakaan Tingkat SMA/SMK/MA, dan Perpustakaan Tingkat Desa. Sedangkan Lomba Peningkatan Literasi Masyarakat yakni Lomba bertutur tingkat SD/MI, lomba resensi buku tingkat SMA/SMK/MA, dan lomba karya Video Tiktok.

"Setiap kategori ada 6 pemenang yakni dari Juara 1 hingga juara Hara-

pan 3," ujarnya.

Semua pemenang mendapatkan Piala, piagam, dan hadiah uang pembinaan. "Semua pemenang mendapatkan hadiah piala, piagam, dan uang pembinaan," tambahnya.

Terakhir, Taufik pun berpesan kepada generasi muda agar membudayakan membaca, karena dengan membaca akan menjadikan masa depan Indonesia lebih baik.

"Kita sampaikan kepada generasi muda, kita ini tidak akan lepas dari budaya literasi, tentunya kemajuan bangsa, masyarakat, serta diri pribadi, jika anda ingin maju, jika anda ingin berkembang, serta ingin memiliki prestasi di masa depan, jangan lupa untuk membaca buku, sumber pengetahuan akan meningkatkan kualitas hidup kita," pungkasnya. (ADV)

Pewartu: Hanafi
Editor: Agus Susanto



Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Budiono

DPRD Balikpapan Soroti Tambahan Anggaran Rp 80 Miliar untuk Proyek Das Ampal

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menyoroti tambahan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk proyek pengendali banjir DAS Ampal.

Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Budiono, mengatakan bahwa lembaga legislatif belum memiliki informasi terkait anggaran tambahan tersebut yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

Jumlah tambahan dana tersebut mencapai Rp 80 miliar, sedangkan alokasi anggaran untuk proyek DAS Ampal dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2023 tidak sebesar itu.

"Saya baru saja mengetahui adanya tambahan anggaran untuk DAS Ampal," ujarnya pada Selasa (19/9/2023).

Lebih lanjut, Budiono menjelaskan

bahwa fraksi-fraksi di DPRD diharapkan dapat melakukan pengecekan rinci terhadap tambahan anggaran tersebut. Tujuannya adalah agar proyek yang telah berjalan sesuai dengan kinerja kontraktor di lapangan.

"Saya memperhatikan tambahan anggaran multiyears DAS Ampal. Karena saya melihat adanya tambahan sekitar Rp 80 miliar. Fraksi-fraksi, saya berharap mereka dapat menanyakan hal ini secara detail," jelasnya.

Budiono menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui alokasi anggaran DAS Ampal dalam pembahasan APBD Perubahan. Namun, tambahan anggaran sebesar Rp 80 miliar ini menjadi pertanyaan bagi DPRD karena pada saat pembahasan

anggaran, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum diterbitkan.

"Saat kami membahas anggaran perubahan kemarin, jumlahnya tidak sebesar itu. Namun, kami menemukannya karena ada dana transfer dari pusat. Kami tidak tahu informasi lebih lanjut saat itu karena PMK belum diterbitkan," tambah Budiono.

Budiono berharap bahwa setiap fraksi mampu melakukan telaah mendalam terkait tambahan anggaran DAS Ampal, terutama mengingat proyek ini telah menghadapi berbagai masalah, mulai dari persentase kinerja di lapangan hingga isu-isu lahan warga. Proyek ini sudah berjalan sejak tahun lalu.

"Nah, inilah tugasnya fraksi-fraksi untuk menanyakan hal ini," tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan/Bom)



Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle

Wakil Ketua DPRD Balikpapan: Tidak Ada Cara Lain Selain Putus Kontrak Proyek DAS Ampal!

BALIKPAPAN - Pengerjaan proyek pengendalian banjir di daerah aliran sungai (DAS) Ampal di Global Sport Jalan MT Haryono Balikpapan terus menjadi tanda tanya terkait penyelesaian mega proyek yang dikerjakan PT Fahreza Duta Perkasa atas perintah Pemkot Balikpapan.

Berbagai pihak, mulai dari warga, tokoh masyarakat, hingga anggota legislatif, telah berkali-kali menyoroti masalah ini. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle.

Proyek senilai Rp 136 Miliar ini telah berlangsung lama dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.

"Ini sudah berlarut-larut, apakah proyek ini akan dikerjakan hingga selesai atau tidak? Komisi III sudah merekomendasikan bahwa tidak

ada cara lain selain memutuskan kontrak, baik dari segi kualitas maupun kuantitas," ujarnya pada Selasa (19/9/2023).

Menurut Sabaruddin Panrecalle, walaupun DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memaksa penghentian kontrak dengan kontraktor, mereka telah memberikan rekomendasi untuk memutuskan kontrak kepada Pemerintah Kota Balikpapan berkali-kali.

"Kita tidak bisa memaksa, tetapi kami telah merekomendasikan hal ini karena terlalu banyak masalah. Selanjutnya, itu tergantung pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Jika terdapat tindak pidana, maka hukum harus berlaku," jelasnya.

"DPRD telah melakukan pengawasan, penelitian, dan pemanggilan pihak terkait. Namun, jika masalah

ini tetap tidak terpecahkan, itu bukan lagi dalam domain DPRD, melainkan merupakan kewenangan Pemerintah Kota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum," tambahnya.

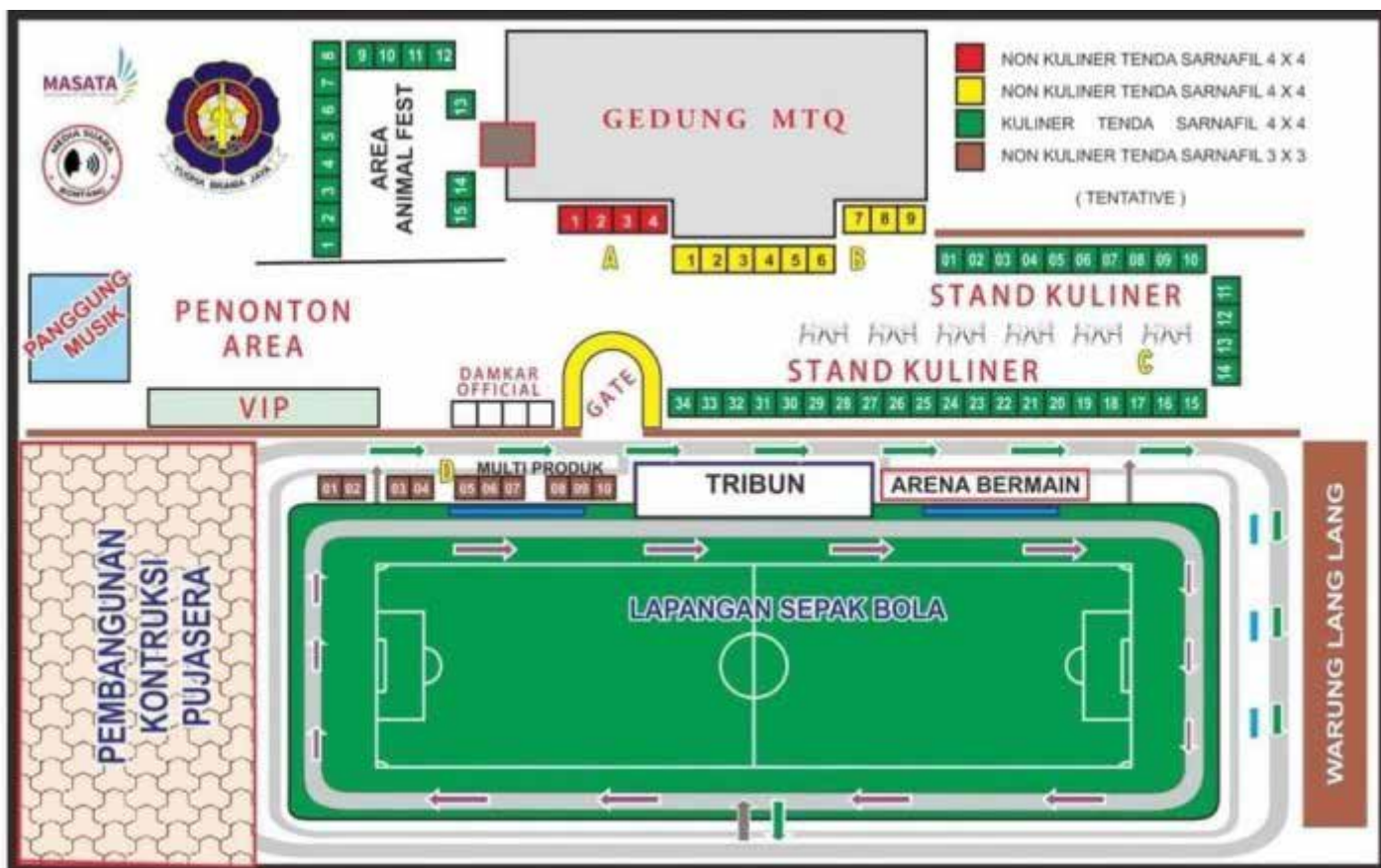
Bahkan dari sudut pandang legislatif, Sabaruddin berpendapat bahwa tidak layak untuk terus mempertahankan proyek ini, dan hal ini dapat dilihat dari kondisi dan kinerja kontraktor. Selain itu, banyak warganet yang telah melihat dan memberikan masukan kepada DPRD.

"Tugas DPRD adalah merancang anggaran, membuat undang-undang, dan melakukan pengawasan. Kami tidak bisa dibandingkan dengan pengadilan yang melakukan penyelidikan. Kami hanya memberikan rekomendasi," pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan/Bom)



DPRD KOTA BONTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ilustrasi maket stand Animal Fest Disdamkartan tahun lalu.

Rustam Nilai Harga Stand Animal Fest Terlalu Mahal

BONTANG - Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam menilai, harga Stand Animal Fest yang akan diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang Oktober 2023 mendatang terlalu mahal bagi para pelaku UMKM.

Menurutnya, harga stand senilai Rp 2,7 juta untuk enam hari itu dinilai tidak sejalan dengan misi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

"Dengan harga segitu, berarti mereka harus bisa dapat Rp 450 ribu sehari. Sanggup nggak pelaku usaha ini dapat segitu, apalagi kalau cuman jual minuman, saya rasa tidak tercover itu," ujarnya beberapa waktu lalu.

Politisi Golkar itupun menawarkan

solusi agar membagi setiap cluster stand, dengan harga yang berbeda antar setiap penyewa.

"Lebih baik dibedakan harganya. Misalnya penjual minuman Rp 450 ribu enam hari, penjual makanan dan lainnya Rp 500 ribu, dan stand pameran atau promosi misalnya perbankan bisa Rp 2 juta, karena mereka (pameran/promosi) outputnya untuk memperkenalkan bukan keuntungan, beda dengan UMKM. Jadi jangan dipukul rata itu keliru," imbuhnya.

Dirinya berharap kegiatan ini bisa sejalan dengan mengutamakan para pelaku UMKM, demi kesejahteraan masyarakat Bontang.

"Paling penting bagaimana setiap

kegiatan instansi pemerintahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tidak perlu mencontoh dari luar. Misal di Samarinda gendeng perusahaan, lembaga dan lainnya. Beda dengan pelaksanaan di Bontang yang didominasi pelaku UMKM. Jadi tidak adil kalau mau disamakan orang perbankan sama penjual minuman," tekannya.

Rustam menegaskan, pasca covid-19 banyak pelaku UMKM sedang berusaha memulihkan ekonomi mereka. Pemerintah harusnya membuka ruang bagi mereka, bukan malah justru mengambil untung dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil. (al/adv)



ISTIMEWA

Satpol PP menertibkan anjal dan gepeng beberapa waktu lalu.

Dewan Dukung Penegakan Perda Penertiban Anjal dan Gepeng

BONTANG - Upaya penegakan perda penertiban anak jalanan (anjal) maupun gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kian marak di Kota Bontang, mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.

Penanganan masalah sosial ini menurutnya sudah seharusnya dilakukan, agar tercipta kota taman yang kondusif, tertib, aman dan nyaman.

"Kami sepakat dan sangat mendukung. Apalagi kebanyakan mereka (gepeng) ini dari luar Bontang. Kalau kita biarkan malah nanti semakin banyak," ujarnya beberapa waktu lalu.

Apabila para gepeng tersebut merupakan warga Bontang, maka dirinya mengaku siap membantu bersama pemerintah daerah. Seperti menyediakan rumah tinggal layak huni, pemberdayaan sosial dan ekonomi, pem-

berian bantuan sosial, dan lain-lain.

"Kalau betul-betul murni orang Bontang yang mengemis karena tidak mampu, oke akan kita bantu. Tapi kan realitanya kebanyakan ada yang koordinir dan bukan asli dari Bontang," terangnya.

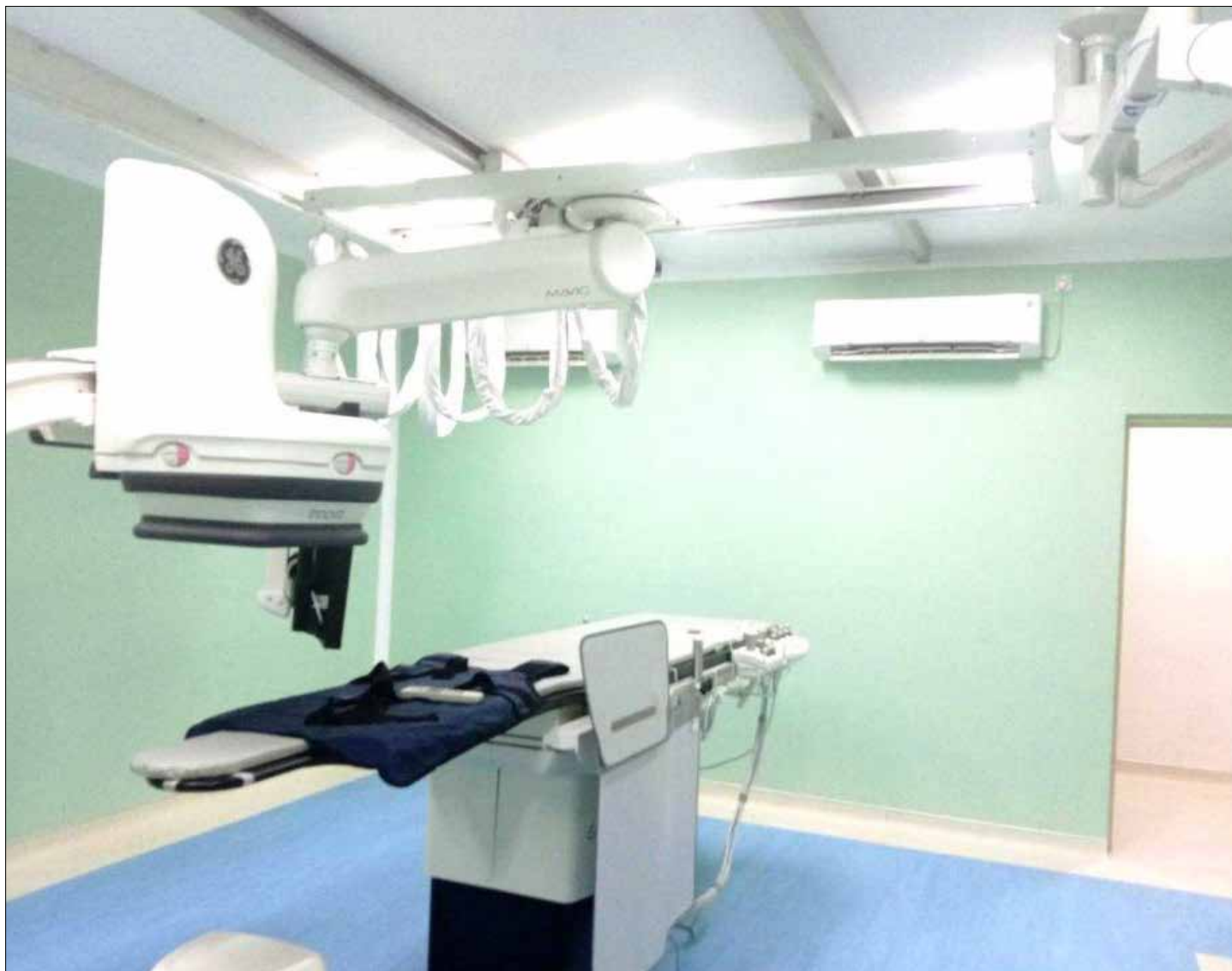
Selain itu kendala lainnya adalah, para gepeng ini dapat membahayakan pengguna lalu lintas, lantaran meminta-minta di pinggir jalan. Ia meminta semua pihak ikut berpartisipasi dengan tidak memberikan sesuatu, agar tidak membahayakan dirinya sendiri juga orang lain.

"Kami tidak larang masyarakat bersedekah. Tapi jangan sampai kebaikan kita justru memicu semakin banyak gepeng ke sini, dan menimbulkan masalah sosial baru. Mereka malah lebih milih ngemis daripada

kerja yang lebih layak," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Bontang Ahmad Yani melalui Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol-PP Eko Mashudi mengatakan, upaya penertiban Anjal dan Gepeng ini terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bontang sesuai dengan Perda Kota Bontang yang berlaku.

"Hal ini sesuai dengan Perda Bontang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Serta Perlindungan Masyarakat. Maka upaya penertiban para gepeng di Kota Bontang perlu semakin massif dilakukan," pungkasnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Pemeriksaan Cath Lab oleh pemkot mei 2023 lalu.

Pengguna BPJS Sudah Bisa Mengakses Cath Lab di RSUD Taman Husada Bontang

BONTANG - Sejak bulan Juli 2023 lalu, RSUD Taman Husada telah membuka Instalasi Kateterisasi Kardiovaskuler atau Cath Lab untuk masyarakat yang menggunakan BPJS.

Terhitung mulai Juli hingga awal September 2023 ini sudah 40 pasien pengguna BPJS terlayani dengan fasilitas kateterisasi jantung.

"Jadi selain umum dan perusahaan, dengan BPJS sudah bisa menggunakan Cath Lab tersebut," jelas Dr. Siti Aisyatur Ridha dari tim humas RSUD Taman Husada Bontang.

Sebelumnya, pengguna BPJS harus pergi ke kota sebelah untuk

pelayanan tersebut karena RSUD, namun sesuai misi RSUD Taman Husada Bontang, yaitu mengembangkan sarana dan prasarana yang memadai, serta komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Bontang terutama pelayanan jantung/kardiovaskuler.

Ridha menjelaskan, Cath Lab baru bisa digunakan dengan BPJS karena sembari melengkapi berkas-berkas administrasi yang kurang sehingga baru disetujui pada tahun 2023 ini.

"Kami memiliki fasilitas Cath Lab sudah lama tapi, pembayaran menggunakan BPJS baru-baru saja disetujui," jelasnya.

Selain itu, sebagai penopang Ibu Kota Negara (IKN) peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Bontang juga ditambah, dengan salah satunya adalah dengan memaksimalkan layanan dari pemerintahan seperti penggunaan BPJS untuk berbagai jenis pengobatan.

"Tentu ini bagian dari keseriusan pemkot untuk warga Bontang mendapatkan hak sehatnya, dengan adanya Cath Lab diharapkan masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi jika ingin berobat," tutupnya.

*Penulis: Syakurah
Editor: Nicha Ratnasari*



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Sispamkota yang digelar Polres Berau dan jajarannya untuk kesiapan pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

DPRD Apresiasi Sispamkota Gelaran Polres Berau, Strategi Persiapan Pengamanan Pemilu

TANJUNG REDEB - Dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 mendatang, jajaran Polres Berau menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di Lapangan Pemuda Tanjung Redeb, Selasa (19/9/2023).

Bupati Berau Sri Juniarsih dalam sambutannya menuturkan, simulasi ini merupakan wujud kesiapan kita bersama dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu serentak 2024 mendatang. Bentuk respon perkembangan lingkungan strategis baik pada tatanan regional, nasional maupun global yang bergerak begitu cepat dan dinamis.

"Suksesnya pelaksanaan Pemilu tersebut bukan hanya dilihat dari tingginya partisipasi pemilih tapi juga kelancaran dan keamanan saat pelaksanaan tahapan pemilu juga menjadi indikator suksesnya pesta demokrasi tersebut," katanya.

Lanjutnya, yang perlu diantisipasi terhadap potensi kerawanan menjelang dan saat pelaksanaan pemungutan suara yakni sabotase, teror, bom, pengrusakan, pembakaran TPS, kotak dan kartu suara serta sarana prasarana pendukung lainnya, hingga money politic atau serangan fajar.

"Saya mengajak kepada semua pihak untuk tekun dan aktif mengikuti perkembangan situasi serta jangan abai atau menganggap remeh masalah sekecil apapun informasi sangat bermanfaat untuk dikaji," ajaknya.

Sispamkota tersebut juga sangat diapresiasi oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dikatakannya, Polres Berau secara sigap telah melakukan langkah-langkah persiapan sedini mungkin. Tentunya sangat strategis dalam pengamanan Pemilu yang akan datang.

"Saya mengapresiasi simulasi yang telah dilakukan Polres Berau dan jajarannya. Langkah ini cukup strategis untuk menghadapi Pemilu mendatang," katanya, Selasa (19/9/2023).

Diharapkan Madri, Pemilu tahun depan berjalan dengan lancar dan aman. Serta tidak terjadi sesuatu konflik atau perseteruan baik diantara pendukung partai politik maupun masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya Sispamkota diharapkan pengamanan Pemilu dapat terjaga. Persiapan awal ini menjadi langkah persuasif dan sangat profesional sehingga pada penyelenggaraannya bisa lebih kondusif. Terutama dalam mengambil tindakan ataupun langkah ke depannya.

"Sehingga terciptanya kondusifitas suatu daerah dan terjaminnya kedamaian dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Berau," sambungnya.

Selanjutnya, Kapolres Berau, Steyven Jonly Manopo menyampaikan, Sispamkota sebagai gambaran dalam menghadapi Pemilu pada 2024. Yang mana diharapkan situasi aman dalam pelaksanaannya.

"Ini menandakan kesiapan kami Polres Berau serta TNI, untuk mengamankan proses jalannya pesta demokrasi nantinya," untkannya.

Dalam hal ini pihaknya melibatkan dua per tiga dari jumlah anggota Polres Berau. Pun dibantu dengan TNI dan Kodim 0902 Berau serta Batalyon Armed dan Skadron 13 Serbu.

"Harapan kami selaku aparat hukum bertanggung jawab terhadap keamanan ataupun proses panjang perjalanan Pemilu. Agar terlaksana dengan damai, aman, dan tentram," tuturnya.

Deklarasi damai yang telah dilakukan juga diharapkan jangan hanya sekedar formalitas saja. Tapi juga betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan Pemilu nanti.

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Nicha Ratnasari



Siswa-siswi SD saat melakukan simulasi penanggulangan kebakaran oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Integrated Terminal (IT) Balikpapan.

Pertamina Gelar Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran, Diikuti 428 Siswa SD PD 1 Balikpapan

BALIKPAPAN - Memasuki musim kemarau dengan potensi bencana kebakaran yang cukup tinggi, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui Integrated Terminal (IT) Balikpapan melakukan sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran kepada siswa Sekolah Dasar (SD) Patra Dharma 1 Balikpapan, pada Senin (18/9/2023) kemarin.

Kegiatan ini diikuti oleh siswa SD Patra Dharma 1 kelas 4, 5, dan 6 dengan total 428 siswa serta dewan guru yang ikut mendampingi. Dalam penyampaian materi, narasumber dari Pertamina menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak serta diiringi dengan video pendukung.

Kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran ini terbagi menjadi 2 sesi, yakni pertama terkait pengetahuan umum cara terbentuknya api, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta cara untuk melakukan pencegahan agar tidak terbentuk api. Dan kedua melakukan praktik secara langsung dengan menggunakan APAR dan juga menutup kain basah.

Spv. HSSE PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Catur Yogi Prasetyo mengatakan, sosialisasi dan simulasi ini sangat penting, mengingat api dan potensi kebakaran selalu berada di sekitar kehidupan masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

"Tahapan-tahapan yang dilakukan

hari ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi siswa SD Patra Dharma 1 dalam memadamkan api bila ada di sekitarnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala sekolah SD Patra Dharma 1 Balikpapan, Sudjito menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada PT Pertamina Patra Niaga atas sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran yang diberikan.

"Dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dan memberikan pengalaman yang berharga bagi mereka ke depannya. Untuk itu kami memberikan apresiasi kepada Pertamina Patra Niaga," ujarnya

Salah satu siswa yang antusias dalam mengikuti kegiatan ini, Keiko mengungkapkan, bahwa momen ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi dilakukannya.

"Hari ini saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan kebakaran, karena saya bisa mencoba secara langsung untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan," jelasnya.

Dengan adanya pelatihan ini, siswa SD Patra Dharma 1 tetap diimbau untuk tidak mencoba di rumah, karena hal ini berbahaya dan harus didampingi.

"Saat ini para siswa dan siswi sudah mengetahui cara memadamkan api, namun tidak untuk dicoba di rumah. Karena pelatihan ini dimaksud-

kan sebagai bentuk pembelajaran dan langkah antisipasi yang dapat dilakukan apabila berada di kondisi yang berbahaya," tambah Jr. Spv. Fire & Safety, Nico Ferianzo.

Ditemui terpisah, Area Manager Comm, Rel & CSR Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra mengungkapkan, kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana kebakaran merupakan hal yang bermanfaat bagi sekolah dalam upaya mencegah dan meminimalisir risiko dampak adanya bencana kebakaran khususnya bagi lingkungan di sekitar siswa dan siswi.

"Pertamina senantiasa mendorong masyarakat terutama sekolah untuk selalu waspada dan tanggap terhadap potensi bencana kebakaran yang mungkin saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana kebakaran," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana kebakaran ini sejalan dengan target Pertamina dalam kontribusi SDGs Kota Balikpapan pada pilar Pembangunan Nasional ke-11 yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Pemberian dan peningkatan wawasan kebangsaan dari Danramil 0908-02/Muara Badak.

Danramil 0908-02/Muara Badak Berikan Pengenalan Wasbang di Kukar

BONTANG – Komandan Rayon Militer (Danramil) 0908-02/Muara Badak, Kodim 09008/Bontang Kapten Inf Roekito memberikan materi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan bela negara kepada peserta pelatihan berbasis kompetensi kejuruan pengolahan hasil perikanan (Pengolahan Ikan) bertempat di Kantor Balai Latihan Kerja, Muara Badak, Kecamatan Muara Badak, pada Selasa (19/9/2023).

Danramil Muara Badak, Kapten Roekito menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yakni merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam ke-

hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ia menambahkan bahwa ada 4 pilar kebangsaan Indonesia dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

"Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia, UUD 1945 yang merupakan sumber hukum negara Indonesia dan sebagai perwujudan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pilar yang terakhir adalah kebhinekaan, Bhineka Tunggal Ika adalah berbeda beda namun tetap satu juga bertujuan untuk menghargai setiap perbedaan dan keragaman namun tetap menjadi satu sebagai bangsa

Indonesia," kata Roekito saat menjelaskan materi Wasbang.

Roekito melanjutkan bahwa Wasbang diberikan kepada peserta untuk memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di mana pun berada.

"Kegiatan pemberian materi ini kepada peserta pelatihan tenaga kerja dengan tujuan peserta pelatihan dapat memahami dan memiliki wawasan kebangsaan yang nantinya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di tempatnya bekerja," tandasnya.

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari

Koran DIGITAL
MEDIA KALTIM.com
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

media_kaltim mediakaltimdotcom mediakaltim.com media kaltim



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di hadapan KPU Kukar.

Deklarasi Pemilu Damai 2024, KPU dan Stakeholder Komitmen Wujudkan Pemilu Berintegritas

TENGGARONG - Pembacaan janji Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar), bersama Polres Kukar, Kodim 0906/Kukar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar dan perwakilan partai politik (parpol), menjadi komitmen untuk menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai.

Deklarasi yang dilaksanakan di hadapan Sekretariat KPU Kukar, menandai Kukar siap menggelar pesta demokrasi 5 tahunan, yang digelar Februari tahun depan. Hal ini pun dipertegas dengan tanda tangan komitmen integritas, dan pelepasan balon ke udara. Yang membawa spanduk bertuliskan "Deklarasi Damai Pemilu 2024".

"Kegiatan deklarasi pelaksanaan Pemilu Damai 2024 yang melibatkan stakeholder dan masyarakat, karena memang pemilu ini jadi pekerjaan kita bersama-sama," ujar Ketua KPU Kukar, Purnomo, Selasa (19/9/2023).

Tentu Purnomo mengatakan KPU

Kukar tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan berbagai pihak. Yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, Bawaslu Kukar sebagai mitra pelaksanaan pemilu, Polres Kukar, Kodim 0906/Kukar. Dan tentunya partai politik (parpol), yang menjadi pihak paling berkepentingan dalam pesta demokrasi.

Seperti yang lalu-lalu, "No Money Politic", "No Identity Politic", "No SARA" dan "No Hoax", jadi kata-kata yang paling sering disuarakan. Namun entah tidak bisa dihilangkan di setiap gelaran Pemilu, baik itu di Pemilu tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Terlebih, semakin kuatnya arus informasi yang ada saat ini. Masyarakat dengan mudahnya mendapatkan informasi di sosial media, sangat rentan dengan adanya berita bohong atau hoaks. "Memang bagian penting suksesnya demokrasi untuk masyarakat Kukar, menghilangkan politik uang, hoaks dan politik identitas," lanjut Purnomo.

Sosialisasi hingga pendidikan politik, kini masih jadi cara yang dilakukan oleh KPU Kukar. Terutama kepada pemilih pemula, yang notabene menjadi pertama kali bagi mereka untuk ikut dalam pesta demokrasi. Memastikan politik uang, hoaks, politik identitas dan politik SARA bisa dihilangkan.

"Itu semua jadi perhatian agar menciptakan demokrasi yang bermartabat," tutup orang nomor satu di KPU Kukar.

Diketahui, lima bulan jelang hari pencoblosan, kini sudah memasuki tahapan tanggapan dari masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS). Selanjutnya akan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 24 September 2023 ini. Dan KPU Kukar mengklaim belum ada tanggapan ataupun laporan dari masyarakat.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari

Rendi Solihin dan Borneo FC Bersinergi Bawa Liga 1 ke Kota Raja

TENGGARONG - Pemkab Kukar berkolaborasi dengan Borneo FC Samarinda untuk membawa Liga 1 ke Kota Raja. Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, usai menerima kunjungan Presiden Borneo FC, Nabil Husein Said Amin, bersama manajemen Pesut Etam, pada Senin (19/9/2023) malam di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kukar.

Rendi Solihin mengatakan, Borneo FC memiliki rencana untuk menggunakan Stadion Aji Imbut Tenggarong sebagai home base Diego Michiels dkk pada gelaran Liga 1.

Rencana tersebut disambut baik oleh Rendi Solihin, selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal itu juga bisa memotivasi unsur sepak bola di Kukar.

"Kami sambut baik kedatangan Borneo FC. Kita banyak membahas soal sepak bola, ini menjadi motivasi bagi kita agar sepak bola Kukar bisa bangkit. Tentunya ke depan kita belajar dan konsultasi ke Borneo FC," ucap Rendi Solihin kepada awak

media.

Tindaklanjut dari pertemuan tersebut, pada Kamis (21/9) mendatang, Pemkab Kukar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), bersama Borneo FC akan melakukan pengecekan langsung ke Stadion Aji Imbut Tenggarong.

"Setelah ini akan ada pengecekan, karena memang masih banyak kekurangan di stadion. Tapi, semoga bukan jadi penghalang besar agar Liga 1 bisa main di Kukar," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Borneo FC, Nabil Husein Said Amin membenarkan klub besutannya memiliki rencana untuk menggunakan Stadion Aji Imbut.

Selain soal rencana penggunaan Stadion Aji Imbut, kedatangan manajemen Borneo FC juga sekaligus untuk bersilaturahmi dengan Pemkab Kukar.

"Silaturahmi dan Borneo FC ada rencana untuk menggunakan Stadion Aji Imbut untuk menghibur masyarakat Kukar," ucap Nabil.

"Nantinya akan ada pengecekan

stadion, terutama lampu, rumput, dan fasilitas penunjang lainnya," sambungnya.

Sementara itu, Kadispora Kukar, Aji Ali Husni menjelaskan, pihaknya punya waktu hingga November untuk mempersiapkan Stadion Aji Imbut agar layak dan memenuhi standar untuk menggelar laga Liga 1.

"Kita diberi waktu hingga November. Memang persiapannya agak mepet, tapi kita optimis bisa memenuhi semua kekurangan yang ada di stadion," jelasnya.

Terkait dengan pengecekan stadion, hal-hal utama yang menjadi perhatian, di antaranya rumput, lampu, toilet, hingga ruang VIP.

"Kalau perlengkapan lain sifatnya bisa dibeli, tapi kalau rumput ini yang butuh penanganan khusus, termasuk kelistrikan butuh biaya besar," tuturnya.

"Tapi kita sambut positif rencana Borneo FC ini, terutama untuk meningkatkan PAD, dan motivasi bagi sepak bola kita," pungkasnya. (MK)





Pemkab Kutim Ajak PGI Kutim Sejalan Berkontribusi Membangun Daerah

SANGATTA - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar persidangan yang dihadiri gembala-gembala dan pengurus gereja yang tergabung di PGI Kutim. Kegiatan dibuka Wabup Kasmidi Bulang dengan ditandai pemukulan gendang di Gereja Toraja Marendeng di Jalan Poros Kabo, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Senin (18/9/2023).

Persidangan PGI wilayah Kutim kali ini mengusung tema "Kasih Kristus Menggerakkan Menuju Rekonsiliasi dan Persatuan". Dalam kesempatan itu, Bimas Kristen Kutim Nakuleni berharap persidangan PGI wilayah Kutim ini dapat berjalan dengan baik dan semua peserta yang mengikuti kegiatan tersebut diberikan kesehatan selalu.

"Siapa pun yang terpilih, diharapkan akan lebih aktif, semangat dan kerja keras untuk kemajuan PGI ke depan," harapnya.

Sementara itu, dari PGI Kaltim Pdt David Rante, menyebut kegiatan persidangan tersebut adalah wadah untuk menjalin komunikasi, dengan cara menjabarkan kasih kepada sesama.

"Kemudian tugas PGI adalah untuk menciptakan rasa kedamaian, mewujudkan komunikasi yang baik antarsesama gereja," tegasnya.

Di tempat yang sama, Wabup Kasmidi Bulang menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, di Kutim terkait pabrik semen yang baru-baru ini telah diresmikan oleh Gubernur Kaltim, diharapkan akan berdampak juga pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kutim.

Di samping itu, Wabup Kasmidi Bulang menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kutim juga telah disahkan baru-baru ini, yakni mencapai Rp 5,9 triliun. Dengan besarnya anggaran ini (APBD-P) dirinya berharap akan berbanding lurus dengan pembangunan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti infrastruktur, jalan maupun rumah-rumah ibadah.

"Untuk itu saya meminta kepada kita semua. Kita harus mengetahui itu, tidak boleh juga kita tidak tahu. Kita harus berperan aktif bersama-sama dengan pemerintah, memberikan kontribusi berupa pemikiran dan saran dalam kemajuan pembangunan kita," ucap orang nomor dua

di Kutim ini.

Ia menambahkan, pengurus-pengurus gereja harus seiring atau bersinergi dengan pemerintah. Sebab, menurutnya ada informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Dan hal itu, bisa tersampaikan melalui pengurus-pengurus gereja yang ada.

"Informasi bahkan di pelosok-pelosok, mungkin ada informasi-informasi yang akurat bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan," tutur Kasmidi.

"Saya sampaikan informasi ini untuk menjadi motivasi bagi kita semua. Sebab pembangunan membutuhkan kita semua," imbuhnya.

Wabup Kasmidi menyampaikan selamat melaksanakan sidang. Ia menyebut dalam sebuah organisasi wajar terjadi pergantian pengurus.

"Ini adalah bagian dari penyegaran organisasi dan ini wajib. Kami dari pemerintah tidak masuk ke teknisnya, namun hanya secara umum," sebutnya.

*Pewarta : Irfan Aditama
Editor : Nicha Ratnasari*

Ratusan Baliho Mirip APK Terpasang, Bawaslu Paser Ingatkan Bacaleg!

PASER - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser mencatat, sebanyak 290 baliho yang menyerupai alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Paser bertebaran di luar waktu pelaksanaan kampanye.

Untuk diketahui, masa kampanye jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, baru ditetapkan pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Hal itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023.

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Paser, Firman menyampaikan, ratusan baliho yang menyerupai APK itu merupakan hasil peninjauan pihaknya sejak Juli 2023 lalu.

Menurutnya, dari ratusan baliho bernuansa APK itu, dominan dipenuhi oleh para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser yang saat ini masih berstatus Daftar Calon Sementara (DCS).

Lebih jauh, jumlahnya mencapai 161 buah, termasuk Bacaleg Provinsi dan Bacaleg DPR RI. Sementara yang lainnya merupakan Bacaleg DPD RI. Firman menyebutkan, pendataan itu merupakan hasil dari pemetaan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).



"Alat peraga ini terpasang di seluruh kecamatan, untuk pengawasannya juga dilakukan oleh masing-masing pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan," sebut Firman.

Firman mengharapkan seluruh Calon Peserta agar mentaati aturan yang telah ditetapkan dalam PKPU nomor 15 tahun 2023. "Aturannya sudah ada, kami harap seluruh calon peserta bisa mematuhi aturan yang ada," tutupnya. (bs)

TOYOTA LET'S GO BUDYOWO!

Bersatu Peduli

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000 member of ASTRA

Bontang

Kasus Dugaan Sinta Rosma Yenti Masih Belum Ada Bukti, Menunggu Hasil Penelusuran Bawaslu Kaltim

PASER - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser memastikan telah menyampaikan hasil penelusurannya ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Sinta Rosma Yenti.

Diketahui, Sinta Rosma Yenti, merupakan Istri Bupati Paser, Fahmi Fadli, yang diduga menginstruksikan Kepala Desa (Kades) untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga demi maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Paser, Fauzan menyebut, dari hasil penelusuran, pihaknya sudah meminta klarifikasi oleh sejumlah pihak yang ada di tingkat desa.

Salah satunya Kades dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sebuah Desa di Kecamatan Long Ikis. Dari upaya klarifikasi itu, diterangkan Fauzan, bahwa benar adanya permintaan pengumpulan fotokopi KTP warga melalui Kades.

"Kalau permintaan KTP, iya. Cuma yang ancaman itu nggak ada," kata Fauzan saat ditemui di ruangnya, Selasa (19/9/2023).

Fauzan mengakui, adanya kendala dalam proses penelusuran informasi tersebut. Hal itu dikarenakan, Bawaslu Kabupaten Paser tidak mendapatkan identitas pemberi informasi sehingga berpotensi tidak terpenuhinya syarat formal dalam penelusuran.

Namun begitu, hasil penelusuran yang sudah dilakukan, dijelaskan Fauzan sudah diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Provinsi Kaltim.

Sehingga, untuk selanjutnya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kaltim.

"Sudah kita serahkan hasil penelusuran dari kami ke provinsi," ucapnya.

Fauzan menambahkan, penyampaian hasil penelusuran dilayangkan pada Jumat (8/9/2023) lalu atau 10 hari yang lalu. Sementara, terhadap hasil putusan Bawaslu Provinsi Kaltim terhadap informasi tersebut, hingga kini belum diketahui. "Kami sudah sampaikan ke provinsi, yang mana untuk menambah pelaporan yang ada," katanya.

Diketahui sebelumnya, berdasarkan isu yang beredar, sejumlah Kades dipanggil ke Rumah Jabatan Bupati Paser pada Juli 2023 lalu. Saat itu mereka diinstruksikan oleh Sinta Rosma Yenti langsung untuk membantu mengumpulkan dukungan dengan fotokopi KTP warga. (bs)



LET'S
GO
BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC
SETIAP SERVICE BERKALA*



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088





Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Simulasi unjuk rasa oleh personel gabungan terhadap tahapan Pemilu.

Polres Paser Simulasikan Pengamanan Pemilu 2024

PASER - Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang di Kabupaten Paser. Kepolisian Resort (Polres) Paser menggelar Simulasi Pengamanan Kota di Kecamatan Tanah Grogot, tepatnya Gentung Temiang, Desa Tepian Batang, Selasa (19/9/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan, sebagai wujud kesiapan Polres Paser dan unsur lainnya dalam pengamanan Pemilu 2024. Simulasi ini menggambarkan proses pengamanan mulai tahapan awal kampanye hingga akhir perhitungan surat suara.

"Simulasi ini merupakan contoh tindakan Polres Paser jika terjadi gangguan keamanan, terutama pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang," kata Kapolres Paser, AKBP Kade Budiarta.

Dalam pelaksanaan simulasi, Polres Paser turut melibatkan Komando Distrik Militer (Kodim) 0904/PSR, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser dan Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol-PP) Kabupaten Paser.

Kade Budiarta mengatakan, dari pelaksanaan ini masih terdapat berbagai evaluasi yang perlu dibenahi. Untuk itu pihaknya akan terus berupaya melakukan tindakan pencegahan dini hingga penindakan saat adanya gangguan yang timbul selama berlangsungnya Pemilu 2024.

"Evaluasi pasti ada, makanya kami tetap berupaya untuk melakukan upaya pencegahan," ujarnya.

Saat proses simulasi, Polres Paser melibatkan 406 personel gabungan dengan menggambarkan adanya massa yang beringas melempari aparat dan membakar ban. Aksi ini turut menerjunkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki.

Adapun tujuan dari kegiatan ini, juga sebagai upaya Polres Paser mengukur kesiapan personel serta sarana dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024. Pihaknya berharap, agar jika terjadi hal serupa yang disimulasikan terjadi, personel dipastikan siap menghadapinya.

"Dalam pelaksanaan pengamanan nanti, kami juga akan mendapat dukungan personel dari Polda Kaltim, ini menjadi dukungan kekuatan personel kami," pungkasnya.

Untuk diketahui, ada beberapa indikator dalam menggambarkan situasi masyarakat dalam penyampaian pendapat yang berpotensi menerjunkan personel. Di antaranya, hijau, kuning dan merah.

Adapun indikator hijau dapat diartikan sebagai situasi ketika masyarakat menyampaikan pendapat secara datar dalam melaksanakan aksi unjuk rasa. Kemudian, jika aksi unjuk rasa diwarnai dengan teriakan dan pelemparan, maka situasinya masuk ke indikator kuning.

Sementara indikator merah, jika aksi unjuk rasa berbandak pada chaos di masyarakat. Dari ketiga indikator itu, potensi yang paling mungkin terjadi di Kabupaten Paser, yakni indikator kuning.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU) :**

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.
MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP



www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com

www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbalikpapan.com

Ada Penolakan Terhadap Pj Bupati PPU Makmur Marbun, Hamdam: Karena Belum Kenal Saja

PPU - Makmur Marbun resmi diangkat menjadi Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) pada Selasa (19/9/2023). Namun, masih terdengar suara penolakan dari sebagian masyarakat Benuo Taka.

Pelantikan berlangsung Selasa (19/9/2023) sore di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk melantik Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD PPU.

Pelantikan Makmur Marbun didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 tahun 2023 tentang Pengangkatan Pj Bupati PPU. Sebelumnya, Makmur Marbun menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri dan ditugaskan untuk menggantikan Hamdan Pongrewa.

Namun, beberapa masyarakat mengungkapkan penolakan melalui pemasangan spanduk di beberapa lokasi. Spanduk tersebut berisi pesan "KAMI MENOLAK TEGAS PJ BUPATI PPU DARI LUAR KALTIM" dan "PENJABAT BUPATI PPU DI LUAR KALTIM KAMI TOLAK, DEMI MENJAGA STABILITAS PENAJAM PASER UTARA YANG KONDISIF"

Salah satu dari spanduk ini sempat dipasang di pagar Kantor DPRD PPU dan Kantor Bupati PPU, sebelum akhirnya ditertibkan oleh petugas Satpol-PP PPU.

Menanggapi penolakan ini, Bupati PPU periode 2018-2023, Hamdam Pongrewa, berpendapat bahwa keputusan Kemendagri adalah yang terbaik untuk kemajuan PPU. Ia juga optimis bahwa Makmur Marbun akan mampu melanjutkan kerja yang telah dilakukan dalam pemerintahan PPU.

"Saya sudah bertemu langsung dengan beliau. Meskipun pertemuan itu singkat, saya melihat bahwa beliau adalah pilihan yang tepat."

"Pastinya, Menteri (Tito Karnavian) tidak akan memilih dengan sembarangan. Keputusan ini pasti telah melalui pertimbangan yang matang sebelum akhirnya diputuskan oleh Menteri," ungkapnya.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa kandidat-kandidat dari Kaltim yang diusulkan tidak memiliki kualitas. Baik yang diajukan oleh DPRD PPU maupun oleh Pemprov Kaltim.

"Namun, dalam hal ini, keputusan ada pada Menteri yang memiliki hak prerogatif dalam pemilihan," tambahnya.

Mengenai penolakan tersebut, Hamdam menyatakan bahwa hal ini adalah respons yang wajar. Ia berpendapat bahwa penolakan muncul karena kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pimpinan baru.

"Penolakan seperti ini adalah hal yang biasa. Ini adalah respons dinamis. Mungkin hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman. Ini adalah hal yang wajar, yang penting adalah membangun komunikasi yang baik," katanya.

Untuk mencatat, penolakan melalui spanduk ini dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Penajam (AMPP) PPU. Selain spanduk, AMPP PPU juga berencana mengadakan aksi demonstrasi sesuai dengan surat pemberitahuan nomor 009/SK/AMPP-PPU/

KT/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang telah disebarluaskan.

Aksi ini akan dilakukan di depan Kantor Polres PPU pada hari Rabu, 20 September 2023, mulai pukul 10.00 Wita, besok. Jumlah peserta yang diharapkan mencapai seribu orang.

Makmur Marbun Berperan Penting dalam Pembentukan Kabupaten PPU Anggota Komisi III DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, juga berpendapat serupa. Menurutnya, penolakan ini tidak memiliki dasar yang objektif. Menurutnya, penolakan ini bertentangan dengan fakta.

"Alasan apa yang mendasari penolakan ini? Jika kita berbicara tentang asal usul, menurut saya, Pak Makmur Marbun juga merupakan bagian dari lokal," ucapnya.

Bijak menekankan bahwa Makmur Marbun memiliki peran penting dalam proses pembentukan Kabupaten PPU, terutama dalam peranannya sebagai pejabat pusat yang terlibat dalam proses pemekaran dari Kabupaten Paser, yang merupakan daerah induk.

"Oleh karena itu, kontribusinya sangat besar bagi kita. Saya pernah bertemu dengan beliau di Jakarta, dan beliau menyampaikan komitmennya yang kuat terhadap PPU. Oleh karena itu, menurut saya, Makmur Marbun adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi ini selama satu tahun hingga Bupati definitif terpilih pada tahun 2024," ungkap Bijak.

Selain itu, Bijak juga melihat bahwa pemilihan Makmur Marbun sebagai Pj Bupati adalah langkah yang paling tepat untuk mengawal pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kecamatan Sepaku. Hal ini terutama dalam konteks memimpin pembangunan PPU sebagai pendukung ibu kota negara yang baru. "Pasti! Karena IKN ini adalah "proyek terbesar di dunia," tentu saja dibutuhkan konsentrasi dan sinergi yang kuat. Bagaimana kita bisa menjaga agar Kabupaten PPU terus berjalan seiring dengan pembangunan IKN," pungkasnya. (SBK)



APBD Perubahan 2023 Tembus Rp 25,32 Triliun, Terbesar dalam Sejarah di Kaltim

SAMARINDA - Rapat Paripurna ke-34 DPRD Kaltim pada Senin malam (18/9/2023) resmi menyetujui peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar Rp8,12 triliun.

Peningkatan ini mendongkrak nilai APBD 2023 menjadi Rp25,32 triliun. Sebelumnya, APBD murni 2023 mencapai Rp17,2 triliun.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, berharap agar peningkatan anggaran ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

"Peningkatan ini memberikan tanggung jawab besar kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memanfaatkan anggaran dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Berbagai program pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 menjadi panduan dalam memaksimalkan penggunaan anggaran ini.

Selain aspek kesejahteraan masyarakat, peningkatan APBD juga berkaitan dengan isu lingkungan. Sebagian dari peningkatan tersebut berasal dari penerimaan dana hibah dari kompensasi Bank Dunia terhadap pengurangan emisi gas karbon sebesar Rp69,15 miliar.

Dana ini memiliki konsekuensi untuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dengan fokus pada pengurangan emisi karbon.

Gubernur Kaltim, Isran Noor, menjelaskan bahwa peningkatan APBD terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan daerah yang mencapai Rp18,69 triliun dari sebelumnya Rp14,62 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan APBD Murni tahun 2023 juga mengalami peningkatan, yaitu dari Rp2,57 triliun menjadi sekitar Rp6,62 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022.

"Peningkatan APBD Perubahan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. Menurut Gubernur Isran, perlu adanya pengawasan bersama untuk memastikan bahwa peningkatan anggaran ini benar-benar memberikan dampak positif pada masyarakat.

Dengan peningkatan anggaran yang signifikan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan dapat melaksanakan program pembangunan yang lebih besar dan berfokus pada pelestarian lingkungan serta pengurangan emisi gas karbon. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan pembangunan di Kaltim menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (MK)



APBD-PERUBAHAN KALTIM 2023

TEMBUS Rp25,32 T

- 1. Peningkatan APBD Kaltim 2023:**
 - APBD Murni 2023: Rp17,2 Triliun
 - Peningkatan dari APBD Murni 2023: Rp8,12 Triliun
 - APBD Perubahan 2023 Kaltim: Rp25,32 Triliun
- 2. Fokus Kesejahteraan Warga:**
 - Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menekankan pentingnya memanfaatkan peningkatan anggaran ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Panduan dari RPJMD 2023:**
 - Penggunaan anggaran ini akan mengacu pada program-program pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023.
- 4. Pentingnya Aspek Lingkungan:**
 - Sebagian dari peningkatan anggaran berasal dari penerimaan dana hibah dari Bank Dunia sebagai kompensasi atas pengurangan emisi gas karbon sebesar Rp69,15 miliar. Hal ini mengindikasikan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan pengurangan emisi karbon.
- 5. Peningkatan Pendapatan Daerah:**
 - Peningkatan APBD terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan daerah yang mencapai Rp18,69 triliun, naik dari sebelumnya Rp14,62 triliun.
- 6. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan:**
 - Penerimaan pembiayaan APBD Murni tahun 2023 juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp2,57 triliun menjadi sekitar Rp6,62 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2022.

Momen Humor di Pelantikan Pj Bupati PPU, Isran: Gubernur dan Wakil Gubernur Bakal 'Tewas'!

SAMARINDA-“Merdeka!” pekik Gubernur Kaltim, Isran Noor. Dengan hanya satu kata, Isran berhasil menciptakan suasana yang lebih santai di Pendopo Odah Etam dalam acara pelantikan pejabat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) pada Selasa (19/9/2023) sore, dan itu langsung menyegarkan.

Tak sedikit yang terkejut oleh pekikan keras dan tak terduga tersebut, yang kemudian disambut dengan tawa oleh para hadirin dan undangan. “Semoga pelantikan ini mendapat berkah, rahmat, dan kasih sayang

Tuhan Yang Maha Esa serta berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya,” kata Isran.

Gubernur Kaltim ini juga membuat hadirin tertawa ketika bertanya, “Siapa Bupati PPU sebelumnya?” Dia juga menyatakan bahwa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur juga akan berakhir dalam waktu dekat dengan nada humor. “Gubernur dan wakil gubernur bakal ‘tewas,’” candanya.

Isran mengucapkan terima kasih kepada Bupati sebelumnya, Hamdam Pongrewa, yang menurutnya telah melaksanakan tugas dengan

sangat baik. “You’re very good, excellent!” puji Isran.

Momen pelantikan ini dianggap istimewa karena PPU bukan hanya wilayah sentral IKN, tetapi juga karena dalam dua hari ke depan, Presiden Jokowi akan kembali mengunjungi IKN. “Segera meninggalkan istana yang lama di Jakarta dan mendatangi istana baru di IKN, meski dalam bentuk kemah,” kata Isran, yang kembali disambut tawa oleh hadirin. (RS1)

Pewarta: Adhi Abdian
Editor: Agus Susanto



Sah, Makmur Marbun Dilantik, Siap Jalankan Tugas sebagai Pj Bupati PPU

SAMARINDA - Pelantikan Pejabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) digelar Selasa (19/9/2023) sore di Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim.

Prosesi ini juga sekaligus menjadi momen pelantikan Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kabupaten PPU.

Pelantikan Makmur Marbun didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor

100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pj Bupati PPU. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menunjuk Makmur Marbun sebagai Pj Bupati PPU.

Sebelumnya, Makmur Marbun menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri dan ditugaskan untuk menggantikan Hamdan Pongrewa, yang masa jabatannya sebagai Bupati PPU berakhir pada hari pelan-

tikan ini.

“Berkat rahmat Allah SWT, saya melantik saudara Makmur Marbun sebagai Pejabat Bupati Penajam Paser Utara, dan saya yakin saudara (Makmur) dapat menjalankan tugas sebagai Bupati PPU,” ucap Gubernur Kaltim Isran Noor saat prosesi pelantikan Makmur. Dari tiga rangkaian pelantikan yang terjadwal, pelantikan Pj Bupati PPU menjadi yang pertama. (Rs1)

Maraknya Penolakan dari Masyarakat PPU, Makmur. Saya Hadir Bukan untuk Menyengsarakan Masyarakat

SAMARINDA – Makmur Marbun telah resmi dilantik Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor pada Selasa (19/9/2023), sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) 2023-2024, menggantikan penjabat sebelumnya Hadam Pongrewa.

Dibalik lancarnya proses pelantikan tersebut, ternyata masih tersisa isu mengenai penolakan dari beberapa kalangan masyarakat PPU terhadap Makmur Marbun. Apalagi, penolakan tersebut sempat ditunjukkan masyarakat dengan melakukan aksi demo hingga penyebaran spanduk penolakan yang dipasang di Kantor Bupati PPU, DPRD PPU, serta di beberapa titik lainnya.

Spanduk tersebut bertuliskan kalimat-kalimat penolakan atas terpilihnya Makmur yang bukan putra asli daerah. Selain itu, Makmur juga tidak masuk dalam daftar usulan nama-nama Pj Bupati yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten PPU.

DPRD PPU sebelumnya mengusulkan Agus Hari Kesuma Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Suhardi Sekretaris DPRD dan Adriani Amsyar sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten PPU.

Menanggapi penolakan itu, Makmur mengatakan bahwa dirinya di-



tunjuk sebagai Pj Bupati PPU, karena mandat langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati PPU Provinsi Kaltim.

“Tentunya tolong edukasi seluruh masyarakat, bahwa saya terpilih sebagai Bupati karena saya ASN dan sudah berjanji jika dibutuhkan ataupun diperintahkan untuk menjadi bupati, saya akan lakukan karena itu sumpah kami sebagai ASN,” ujarnya.

Soal demo dan pemasangan spanduk atas penolakan dirinya, Makmur mengatakan hal tersebut wajar karena negara Indonesia adalah negara demokrasi.

“Untuk masyarakat yang melakukan demonstrasi silakan, karena itu adalah hak mereka untuk menyuarakan sesuatu, tapi bersuaralah sesuai

aturan,” katanya.

Makmur meyakinkan masyarakat PPU untuk tidak khawatir dengan ditugaskan dirinya sebagai Pj Bupati PPU, karena Makmur yakin akan mampu mengemban amanah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

“Saya ini sebelumnya adalah Direktur Produk Hukum Daerah, saya pejabat yang melakukan pembentukan peraturan daerah, tentunya saya hadir bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” pungkas

Sebelum menjabat Pj Bupati PPU, Makmur Marbun yang sebelumnya adalah Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dan hari ini, beliau sudah dilantik sebagai Pj Bupati PPU periode 2023-2024.

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

Pj Bupati PPU Berkomitmen Pemerintahan akan Berjalan dengan Baik

SAMARINDA - Sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun berkomitmen untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahan Penajam Paser Utara (PPU) akan berjalan dengan baik.

Hal ini dikatakan oleh Makmur usai pelantikan dirinya sebagai Pj Bupati PPU 2023-2024, pada Selasa (19/9/2023), di Pendopo Odah Etam Gubernur Kaltim. “Hal pertama yang saya lakukan adalah meyakinkan pemerintahan berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk melakukan hal itu, Makmur mengatakan perlunya gerakan sinergi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(Forkopimda) yang ada di PPU.

“Oleh sebab itu besok saya akan mengagendakan pertemuan seluruh Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, dan berkoordinasi secara intens” ungkapnya.

Makmur mengatakan mustahil pemerintahan berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan seluruh Forkopimda dan masyarakat. Oleh sebab itu, Makmur berharap adanya peran masyarakat dalam sukseskan pemerintahan. “Kita harus satu irama karena tanpa mereka tidak mungkin berjalan dengan baik dan pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri,” ujarnya.

Dalam masa jabatan Pj yang singkat, yakni satu tahun ke depan, tugas Pj Bupati PPU periode 2023-2024 ini lumayan berat. Selain harus sukseskan IKN, Pj Bupati juga diamanahkan dalam mempersiapkan daerah dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). “IKN itu kan kebijakan nasional, jadi bagaimana kita mencoba untuk sinergikan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, agar IKN itu bisa berjalan lancar,” tutupnya.

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Lebih Dekat dengan Satu Klik



Selamat Ulang Tahun

BAPAK DR. H. ISRAN NOOR

Gubernur Kalimantan Timur

20 September 1957





SATGAS PAMTAS SUKSES GAGALKAN PENYELUNDUPAN NARKOBA HINGGA CEGAH PEREDARAN BARANG ILEGAL

BACA HALAMAN 2-4





Upacara Penyambutan dan Pelepasan Satgas Pamtas di Lapangan Apel Mako Lantamal XIII, pada Selasa (19/9/2023).

Sukses Satgas Pamtas: Gagalkan Penyelundupan Narkoba hingga Cegah Peredaran Barang Ilegal

TARAKAN - Upacara Penyambutan dan Pelepasan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Darat RI-Malaysia dari Yonif 621/MTG dan Yon Armed 5/PG kepada Yon Arhanud 12/SPB digelar di Lapangan Apel Mako Lantamal XIII, Jalan Sei Ngingitan, Kelurahan Mambrungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa (19/9/2023).

Brigadir Jenderal TNI Ari Estefanus, Komandan Korem 092/Maharajalila, menyatakan bahwa selama 13 bulan terakhir, Satgas Pamtas telah menjalankan tugas pengamanan perbatasan Kaltara dan sebagian wilayah Kaltim dengan sukses.





“Setelah lebih dari 13 bulan melaksanakan pengamanan perbatasan di wilayah Kaltara dan sebagian personel di wilayah Kaltim, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua batalyon tersebut karena berhasil menjalankan tugas di wilayah Kaltara. Mereka telah memberikan kontribusi besar dalam penugasan ini,” ungkap Brigadir Jenderal TNI Ari Estefanus.

Menurutnya, Satgas Pamtas telah melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari patroli untuk memeriksa patok perbatasan hingga memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Selama misi ini, Satgas Pamtas telah memeriksa seluruh 7500 patok perbatasan yang ada. Ari menjelaskan bahwa beberapa

patok dalam kondisi rusak atau tertimbun oleh pohon, bahkan ada yang bergoyang atau bergeser. Hal ini telah dicatat dan dilaporkan kepada komandan mereka untuk mendapatkan perhatian. Namun, perbaikan atau pemindahan patok bukan merupakan tugas dari Satgas Pamtas.

Dia juga menyebutkan bahwa jumlah personel Satgas Pamtas telah berkurang dari 450 menjadi 350 selama misi pengamanan perbatasan. Selama bertugas, Satgas Pamtas Yonif 621/MTG dan Yon Armed 5/PG telah mencapai berbagai keberhasilan, termasuk menggagalkan upaya penyelundupan 20 paket narkoba jenis sabu seberat 20,8 kg yang melibatkan warga Malaysia dan Indonesia. Selain itu, mereka juga

telah menggagalkan masuknya barang-barang ilegal seperti ballpres dan kosmetik.

Brigadir Jenderal TNI Ari menggarisbawahi bahwa salah satu perhatian utama dalam menjaga kawasan perbatasan adalah mencegah peredaran narkoba dan barang-barang ilegal. Dengan panjang wilayah perbatasan mencapai 1039 km, peran Satgas Pamtas sangat penting dalam mencegah berbagai tindakan kriminal. “Dengan 1039 km wilayah perbatasan, kita harus memahami pentingnya menjaganya. Mereka yang ditugaskan telah berdinasnya selama satu tahun di satuan ini,” tambahnya. (pcs)





Komandan Korem 092/Maharajalila Brigjen TNI Ari Estefanus



Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang

Jaga Keamanan di Perbatasan Kaltara, Gubernur Zainal Apresiasi Satgas Pamtas

TARAKAN - Upacara Peyambutan dan Pelepasan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Darat RI-Malaysia, dari Yonif 621/MTG dan Yon Armed 5/PG kepada Yon Arhanud 12/SPB berlangsung di Lapangan Apel Mako Lantamal XIII, Jalan Sei Ngingitan, Kelurahan Mambrungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (19/9/2023).

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, yang juga bertindak sebagai Inspektur Upacara, mengatakan bahwa Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Darat RI-Malaysia sebelumnya, yakni Yonif 621/MTG dan Yon Armed 5/PG, telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Terbukti bahwa mereka berhasil menggagalkan berbagai perkara tindak pidana seperti penyelundupan orang, narkoba, dan barang ilegal lainnya.

"Selain melakukan pengamanan perbatasan, mereka juga berhasil

menggagalkan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana. Seperti penyelundupan orang, ballpres, narkoba. Mereka juga melakukan kegiatan di perbatasan yang berhubungan dengan kriminalitas," ucapnya kepada media usai Upacara Lepas Sambut Satgas Pamtas di Mako Lantamal XIII, Selasa (19/9/2023).

Mengingat keberhasilan Satgas Pamtas tersebut, Zainal berharap kepada pasukan baru yang akan datang untuk melanjutkan atau bahkan melebihi pencapaian tersebut. "Kita harapkan pasukan yang baru ini juga bisa melanjutkan hal itu. Mudah-mudahan perbatasan kita selalu aman, selalu dijaga, dan tidak sejangkal tanah pun dirampas oleh negara lain," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Zainal juga mengingatkan kepada pasukan yang baru untuk tetap solid selama bertugas. "Jaga kekompakan, jaga nama kesatuan, dan jaga kesehatan. Untuk dukungan Pemprov kepada Satgas

Pamtas melalui Korem. Nanti kita ada hal-hal yang bisa membantu pasukan perbatasan," ucapnya.

Sementara itu, Komandan Korem 092/Maharajalila Brigjen TNI Ari Estefanus mengingatkan kepada pasukan yang baru untuk tetap semangat menjalankan tugas di perbatasan. Dikatakannya, apa yang sudah dilaksanakan Satgas Pamtas sebelumnya harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Penekanan yang akan masuk, apa yang sudah dilaksanakan satgas sebelumnya harus dilanjutkan, yang baik dilanjutkan yang kurang dioptimalkan. Yang buruk dibuang, jadi mereka tetap melaksanakan patroli patok kemudian tugas dan tanggungjawabnya kemudian akan melaksanakan pengamanan perbatasan dari segala bentuk kegiatan ilegal mulai dari ilegal narkoba, ilegal barang-barang, kemudian ilegal termasuk ada dilimpahkan pelintas batas dan TPPO," pungkasnya. (pcs)



Kasi Bimas Islam Kemenag Tarakan, Sultan Halim

Kemenag Ajak Tokoh Agama Jaga Kondusivitas di Pemilu 2024

TARAKAN - Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tarakan mengajak seluruh tokoh agama menjaga kondusivitas jelang Pemilu 2024. Tokoh agama memiliki peran penting, terutama dalam mensosialisasikan hak memilih dan mencegah golput, serta menjaga kondusivitas selama pemilu 2024 berlangsung.

“Untuk menyukseskan Pemilu yang akan dilaksanakan pada Februari 2024, kami di Kemenag Tarakan berupaya semaksimal mungkin mengedukasi masyarakat, terutama pemuka agama, untuk bersama-sama menjaga kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kemenag Tarakan, Sultan Halim kepada Kaltimtaras, Selasa (19/9/2023).

Sultan mengatakan beberapa waktu lalu, Kemenag Tarakan telah mengadakan pertemuan dengan para tokoh agama, termasuk Da’i dan takmir masjid.

“Kami mengharapkan mereka memberikan dakwah di hari Jumat

atau ceramah keagamaan untuk menyisipkan tema edukasi pemilu yang demokratis. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan menjelang Pemilu 2024,” katanya.

Dia berharap para tokoh agama dapat menjaga agar rumah ibadah menjadi tempat yang ramah dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kemenag juga menghimbau kepada masyarakat umum untuk menjaga kondusivitas jelang Pemilu 2024. Berbeda pendapat adalah hal yang wajar, yang terpenting adalah tidak terjadi konflik.

“Pemilu adalah sarana untuk menciptakan suasana kehidupan yang lebih baik bagi bangsa kita. Kita harus mewujudkan pemilu yang damai, di mana setiap orang memiliki pandangan berbeda, dan itu adalah hal yang biasa dalam demokrasi,” ucapnya.

Sementara itu, Penyelenggara Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tarakan, Otto Simon Tanduk, mengatakan bahwa pihak-

nya telah menghimbau kepada pendeta untuk memberikan pemahaman kepada jemaat, terutama dalam menjaga kondusivitas, terutama saat memasuki tahapan-tahapan politik yang sudah berjalan.

“Kami berharap pendeta dapat memberi pemahaman kepada jemaat bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dan tidak perlu saling benci,” ucapnya.

Otto juga mengingatkan pemuka agama untuk tidak terlibat dalam politik praktis. “Sebagai pemimpin dan panutan, mereka harus menunjukkan contoh politik yang sehat kepada jemaat,” katanya.

Melalui peran pemuka agama tersebut, dia berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan penuh kebahagiaan, kedamaian, dan ketenteraman serta dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. “Selain itu, pemilu harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil,” tutupnya. (pcs)



Bupati Kabupaten Tana Tidung Ibrahim Ali sebagai narasumber pada kegiatan BRGM RI di Jakarta, belum lama ini.

Talk Show BRGM RI: Bupati Tana Tidung Beber Manfaat Mangrove untuk Lingkungan

TANA TIDUNG – Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) berkesempatan hadir sebagai narasumber pada acara Talk Show dengan tema “Catatan Kinclong Metode Silvofishery.” Momentum ini bertepatan dengan Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi (LIKE) yang merupakan bagian dari Road to COP28 UAE 2023, acara tersebut diselenggarakan bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) RI. Kegiatan ini berlangsung di Dildi Indoor Multifunction Stadium Gelora Bung Karno, Jl. Pintu Satu Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bupati Ibrahim Ali, dalam paparannya menjelaskan bahwa Presiden RI melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, memberikan mandat kepada BRGM untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove dari tahun 2021 hingga 2024 den-

gan luasan mencapai 600.000 hektar. Program ini tersebar di 9 Provinsi di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Langkah ini diambil untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi mangrove.

Bupati menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi melalui edukasi kepada semua stakeholder, termasuk para pemerhati mangrove.

Dalam paparannya, Bupati Ibrahim menjelaskan tiga topik utama yang berkaitan dengan perkembangan perluasan mangrove di KTT. Pertama, penting bagi masyarakat dan pemerhati mangrove untuk memahami manfaat mangrove terhadap produktivitas tambak, terutama di

KTT. Kedua, dia memaparkan skema serta strategi dukungan pemerintah daerah dalam upaya percepatan rehabilitasi mangrove, khususnya di area tambak.

“Terakhir, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya percepatan rehabilitasi mangrove, khususnya di area tambak,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Bumi Upuntaka, mengharapkan melalui kegiatan talkshow yang digagas oleh BRGM RI, bisa mempromosikan potensi pengembangan mangrove di KTT hingga ke kanca Nasional.

“Manfaat pengembangan mangrove di KTT, dapat berperan penting dalam siklus karbon, serta berperan penting untuk menjaga kestabilan wilayah dari ancaman gelombang,” pungkasnya. (tin)



GAET INVESTOR: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A. Paliwang SH, M.Hum mendampingi kunjungan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Gubernur Gandeng Asprindo Tarik Investor ke Kaltara

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah bermitra dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dalam rapat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Asprindo dan Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara daring di rumah jabatan (rujab) Gubernur Kaltara, Ahad (17/9).

“Mudah-mudahan para anggota Asprindo yang memiliki jaringan dan dukungan yang kuat dapat membuka peluang baru bagi pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan industri lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.

Dihadapan jajaran DPW Asprindo Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang meminta dukungan dalam menarik investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

“Mudah-mudahan dengan masuknya beberapa industri yang akan dibawa oleh Asprindo, kita dapat membentuk suatu kampung industri,” ungkapnya.

Banyak potensi dan peluang yang ada untuk pembangunan di Provinsi Kaltara, termasuk dalam bidang pertanian. Saat ini, kata Gubernur Zainal, petani-petani milenial sudah mulai aktif dan berperan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kaltara, dengan kelompok petani milenial yang telah terbentuk di 4 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

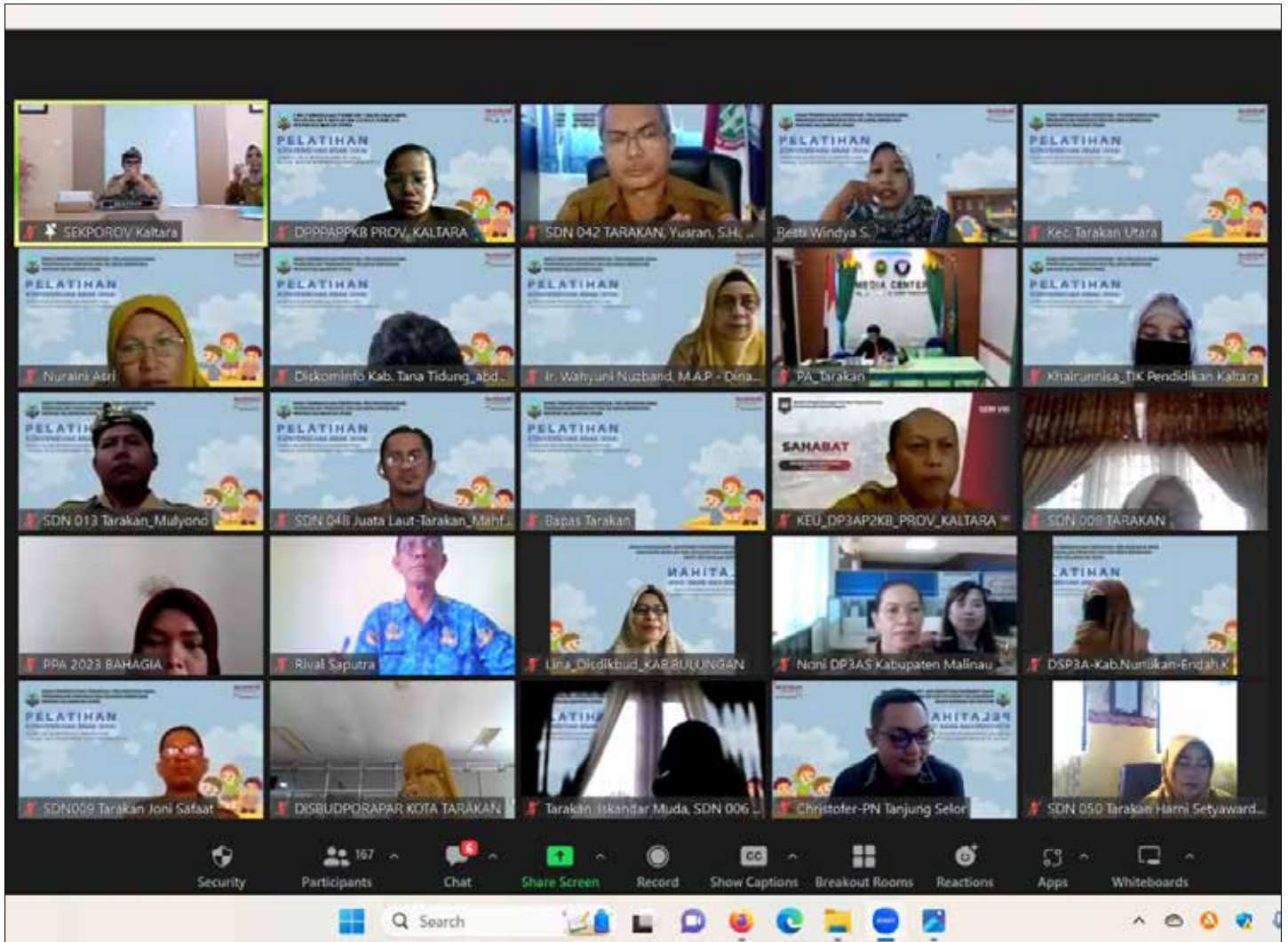
“Hal ini juga telah disampaikan bahwa petani-petani di Kaltara telah aktif berperan, dan kami sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN), bukan hanya untuk provinsi tetangga, melainkan Kaltara menjadi gerbang

IKN,” ujarnya.

“Dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), selalu memberikan dukungan dan mengembangkan usaha di sektor pertanian dan peternakan dengan menyediakan bantuan berupa bibit pohon serta hewan ternak yang dibeli dan dikembangkan untuk digunakan di Kaltara,” sambungnya.

Gubernur juga langsung menyampaikan kepada Ketua DPP Asprindo, Jose Rizal, agar dapat membantu DPW Asprindo Kaltara dalam memberikan dukungan melalui peluang investasi bagi pengusaha besar untuk berinvestasi di Kaltara.

“Dan saya, melalui kesempatan ini, ingin menyatakan bahwa jika ada investor di Kaltara, termasuk semua proses aplikasi dan sebagainya, saya akan membantu mempercepatnya dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di Kaltara,” katanya. (dkisp)



Bangun SDM Terlatih untuk Wujudkan Provinsi Layak Anak

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, M.AP menghadiri secara virtual kegiatan Pelatihan Hak Anak Tahun 2023 pada, Selasa (19/9/2023).

Sekprov mengungkapkan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Ia mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjadikan Kaltara tempat yang layak bagi anak-anak.

“Semoga melalui pelatihan ini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih akan muncul, mampu memahami konvensi Hak Anak secara konseptual, dan menerapkannya di Kaltara,” jelas Sekprov.

Sekprov Suriansyah juga mengingatkan pentingnya Undang-Undang

(UU) Perlindungan Anak berdasarkan prinsip-prinsip Hak Anak, yang merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis dari berbagai negara. Indonesia, termasuk Kaltara, telah meratifikasi konvensi Hak Anak sejak tahun 1990.

Lebih lanjut, Sekprov mengungkapkan hasil dari evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023.

Dikatakan bahwa dari lima Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi mandiri, tiga di antaranya, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Malinau, berhasil lolos untuk mengikuti verifikasi administrasi.

“Ada dua kabupaten/kota berhasil meraih KLA kategori Pratama. Hal

ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama menciptakan Kaltara yang layak bagi anak-anak,” kata Sekprov Suriansyah.

Selain itu, berdasarkan evaluasi data KLA Tahun 2023, Pemerintah Kalimantan Utara memutuskan untuk melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) secara online.

“Tujuannya adalah menciptakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan memahami Konvensi Hak Anak secara menyeluruh, serta mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kaltara. Dengan semangat ini, Kaltara bergerak maju menuju status yang lebih baik sebagai tempat yang ramah anak,” tuntasnya. (dkisp)

PDN PEMERINTAH PROVINSI

TERTINGGI

No	Nama Provinsi	% PDN thd Total RUP
1	Provinsi Kalimantan Tengah	53.20%
2	Provinsi Kalimantan Utara	50.96%
3	Provinsi Maluku Utara	49.54%
4	Provinsi Sumatera Selatan	49.52%
5	Provinsi Jambi	49.41%

TERENDAH

No	Nama Provinsi	% PDN thd Total RUP
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	10.89%
2	Provinsi Papua	13.51%
3	Provinsi Papua Tengah	14.73%
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat	16.06%
5	Provinsi Sumatera Utara	23.30%

TERTINGGI

No	Nama Provinsi	Realisasi Rp PDN
1	Provinsi DKI Jakarta	Rp9,753.90M
2	Provinsi Kalimantan Timur	Rp3,606.27M
3	Provinsi Jawa Tengah	Rp3,225.15M
4	Provinsi Jawa Timur	Rp2,890.87M
5	Provinsi Jawa Barat	Rp2,840.76M

Kaltara Bertengger di 5 Besar Penggunaan Produk Dalam Negeri

TANJUNG SELOR - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masuk dalam 5 besar provinsi dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi dalam persentase terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan persentase 50,96, berada di atas Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mencapai 53,20 persen.

Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen.

Sedangkan provinsi dengan Penggunaan PDN tertinggi secara nilai rupiah adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar).

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui zoom meeting di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur, pada Senin (18/9).

“Berdasarkan data dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI hingga 15 September 2023, Kaltara provinsi urutan ke-2 penggunaan PDN Tertinggi terhadap RUP, atau berada di atas Kalteng yang mencapai 53,20 persen. Urutan ketiga adalah Maluku Utara dengan persentase 49,54 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 49,52 persen, dan Jambi dengan 49,41 persen,” jelas Sekprov Kaltara, Suriansyah.

Hadir mendampingi Sekprov Suriansyah di antaranya Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah, Amir Hamsyah, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Hj. Hasriyani, S.H., M.M.

Rakor dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Kementerian Koor-

dinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala LKPP RI, Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., serta Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.

Diketahui bahwa ada lima tujuan dari P3DN, yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan utilisasi nasional untuk meningkatkan efisiensi industri agar dapat bersaing di pasar global, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan mengoptimalkan belanja pemerintah, dan penghemat devisa negara.

Adapun target capaian yang telah tercapai meliputi, capaian 95 persen target serapan APBD/APBN, transaksi minimal sebesar 500 triliun di e-katalog, peningkatan permintaan domestik terhadap produk dalam negeri, dan peningkatan jumlah onboarding UMKM/Industri Kecil Menengah ke ekosistem digital. (dkisp)



PEMBUKAAN : Gubernur – Wakil Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum – Dr Yansen TP, M.Si memimpin pelaksanaan Rakorwil FKUB se-Kalimantan, Senin (18/9).

Kaltara Tuan Rumah Rakorwil FKUB se-Kalimantan 2023

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP., M.Si, memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023.

Diketahui bahwa Provinsi Kaltara menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakorwil FKUB se-Kalimantan tahun 2023. Pembukaan Rakorwil dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (18/9).

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik pelaksanaan Rakorwil dan berharap acara ini akan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar FKUB se-Kalimantan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ia juga mengungkapkan bahwa Kaltara telah menjadi teladan di Kalimantan dalam strategi dan upaya yang dilakukan oleh FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama.

“Kaltara sudah membuktikan itu dengan selalu masuk 10 besar dalam penilaian indeks Kerukunan Umat

Beragama (KUB) sejak tahun 2013 sampai sekarang. Pada tahun 2019, kita bahkan peringkat pertama. Sekarang di tahun 2022, kita berada pada peringkat 3 setelah Riau dan NTT, dan Kaltara tidak pernah keluar dari 10 besar nasional,” kata Gubernur Zainal.

Selama Rakorwil ini, peserta akan membahas berbagai isu terkait kerukunan umat beragama. Hal ini mencakup penguatan kelembagaan FKUB, strategi dan upaya menjaga toleransi serta kerukunan umat beragama, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Gubernur juga menekankan bahwa Rakorwil ini diharapkan dapat menjadi persiapan yang baik untuk menyambut pemilihan umum (pemilu) dengan damai. Beliau menegaskan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan toleransi selama proses pemilu.

Selain itu, Gubernur Zainal Paliwang mengumumkan bahwa Kaltara telah membentuk Komite Indonesia Bersatu (KIB), sebuah inisiatif yang menghimpun berbagai etnis dan agama.

Menurut Gubernur, Kaltara merupakan gambaran mini dari Indonesia, dengan semua suku, agama, dan etnis yang ada di Kaltara. “KIB bertujuan untuk mempromosikan persatuan, kerukunan, dan keberagaman sebagai kekuatan Indonesia yang sejati,” ungkap Gubernur Zainal.

Gubernur berharap bahwa melalui Rakorwil FKUB Zona Kalimantan dan keberadaan KIB, Kaltara akan terus menjadi contoh positif dalam memelihara harmoni antar-etnis dan agama, dan juga akan berkontribusi positif dalam memperkuat persatuan di seluruh Indonesia.

“Kita berharap Rakorwil ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman bagi FKUB se-Kalimantan dalam menjaga kerukunan umat beragama,” tutup Gubernur Zainal Paliwang.

Rakorwil FKUB se-Kalimantan tahun 2023 dihadiri oleh sekitar 180 peserta dari FKUB provinsi, kabupaten/kota di seluruh Kalimantan. Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 18 hingga 20 September 2023. **(dkisp)**



Penataan Hutan Kota Bunda Hayati menjadi Kebun Raya gunakan konsep pentahelix.

Transformasi Hutan Kota Bunda Hayati ke Kebun Raya: Progres Capai 25 Persen

TANJUNG SELOR - Pengerjaan transformasi Hutan Kota Bunda Hayati menjadi Kebun Raya terus berlanjut dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Bulungan, Syarwani, menjelaskan bahwa proyek penataan Hutan Kota ini menggunakan konsep pentahelix. Konsep ini menggandeng akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

"Kami ingin melibatkan semua pihak dalam upaya merubah Hutan Kota menjadi Kebun Raya. Rencananya, di dalam Hutan Kota akan dibangun jalur jogging track dan fasilitas untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," ungkap Syarwani, belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR) Bulungan, Khairul, menjelaskan bahwa

fokus PUPR Bulungan pada proyek ini adalah pada bagian Sumber Daya Alam (SDA). "Kami berkonsentrasi pada bagian SDA, dan saat ini progres pengerjaan dari kami telah mencapai 25 persen," ujar Khairul pada Selasa (19/9/2023).

Adapun total progres pengerjaan keseluruhan saat ini telah mencapai 5,8 persen. PUPR Bulungan, kata Khairul, terlibat dalam beberapa aspek proyek, seperti pembangunan jalan inspeksi, sistem irigasi, pengairan, dan lainnya.

"Kami saat ini tengah mengerjakan pembangunan jalan inspeksi serta jalan primer yang diberi lapisan tanah timbunan. Selain itu, juga ada proyek pengamanan embung serta pembersihan lahan yang akan dijadikan area taman atau land clearing," jelasnya.

Selain pembangunan jalan, area tersebut juga mengalami penim-

bunan lahan untuk nantinya dijadikan sebagai pusat aktivitas bagi para pelaku UMKM. Konstruksi jalan primer akan dilanjutkan dengan pengaspalan, sementara jalan inspeksi menggunakan paving agar dapat digunakan sebagai lintasan jogging track.

"Pekerjaan yang akan kami selesaikan pada tahun ini mencakup penimbunan lahan, dan tahun depan kami akan melanjutkan dengan pengerasan, termasuk pembangunan area parkir untuk pengunjung," tambahnya.

Jalan primer yang dikerjakan oleh PUPR Bulungan memiliki panjang sekitar 1,3 kilometer. Sedangkan jalan tersier mencapai sekitar 744 meter dengan jalan paving selebar 3 meter dan panjang 1.482 meter. "Namun, badan jalan akan disiapkan dengan lebar 2 hingga 5 meter," pungkaskannya. (tin)



Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana mayat seorang pria ditemukan dalam keadaan membusuk.

Penemuan Mayat Membusuk di Kebun Buah Tanjung Selor Gegerkan Warga

TANJUNG SELOR - Penemuan mayat tanpa identitas menggempakan warga Tanjung Selor, Bulungan. Kondisi mayat tersebut sudah membusuk dan nyaris tidak terdeteksi identitasnya, baik dari segi fisik maupun pakaian yang dikenakan.

Kepolisian kesulitan untuk mencari identitas mayat tersebut. Beberapa upaya dilakukan dengan cara mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kapolresta Bulungan, Kombes Pol Agus Nugraha melalui Kasi Humas, Bripka Hadi Purnomo saat dikonfirmasi membenarkan soal informasi penemuan mayat tanpa identitas itu.

“Iya benar, telah ditemukan mayat tanpa identitas. Lokasinya berada di kebun buah milik masyarakat yang berbatasan dengan Mess PT Abdi

Borneo, divisi Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan,” ujar Bripka Hadi Purnomo kepada wartawan pada Selasa (19/9/2023).

Mayat tanpa identitas itu ditemukan oleh warga sekitar pada Senin, 18 September 2023. Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penemuan mayat yang kondisinya tidak terkenal. Polisi langsung bergegas ke lokasi dan melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan saksi.

“Untuk sementara, identitas mayat belum diketahui. Namun, berdasarkan identifikasi awal, mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki,” ucapnya.

Saat ini, jenazah laki-laki tersebut sudah diantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soemarmo Sosroatmodjo, Tanjung Selor, guna dilakukan proses identifikasi lebih

lanjut.

“Sementara ini, kita masih meminta keterangan saksi dan juga mencari barang bukti. Kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya. Hasil olah TKP belum ditemukan ciri-ciri khusus, karena kondisi mayat yang sudah tidak dikenali, diperkirakan sudah dua minggu lalu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tengkapak, Martinus, saat dikonfirmasi membenarkan soal penemuan mayat pria tersebut. Namun, pihaknya belum mengetahui lebih lanjut modus dan darimana yang bersangkutan berasal.

“Iya betul ada penemuan mayat, kita belum mengetahui informasi detail, kita serahkan ke aparat berwajib,” pungkasnya. (tin)